

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I

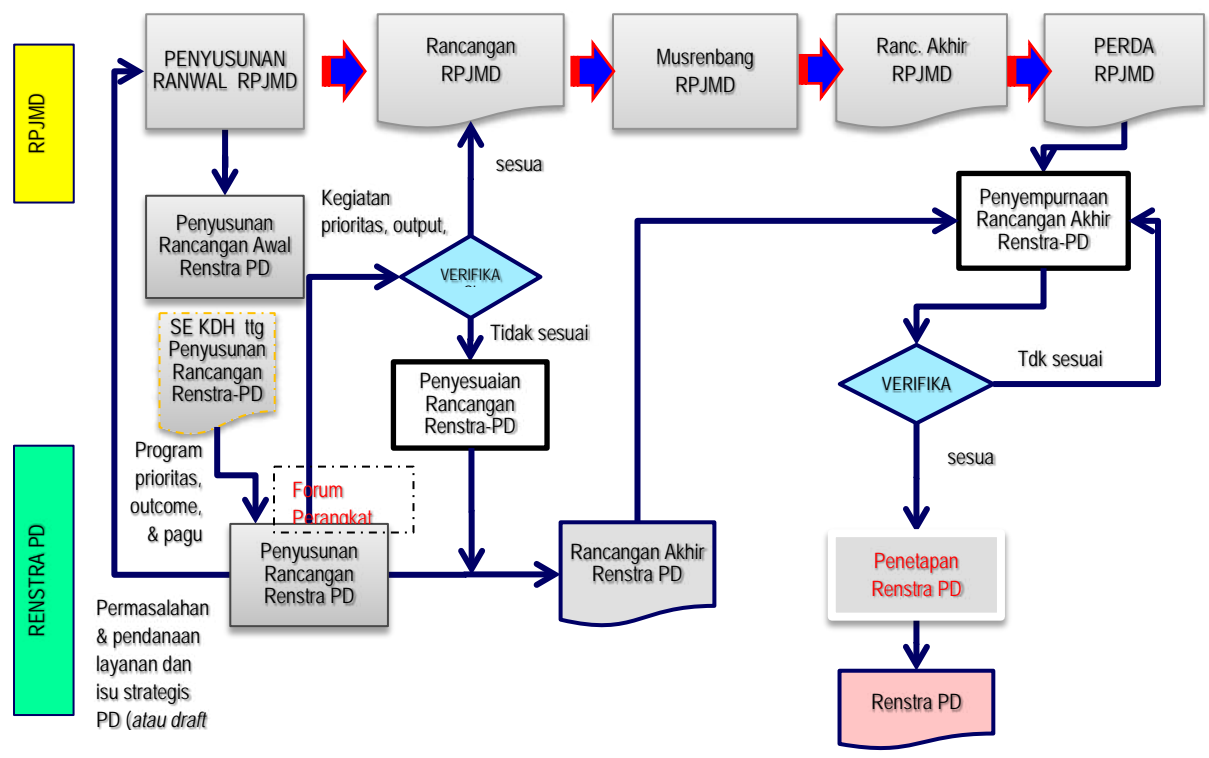
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis perangkat kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen yang disebut rencana strategis (renstra). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup melakukan perubahan renstra pada program, dan kegiatan serta indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif. Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta indikator yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

Renstra perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan.

Perubahan renstra dilakukan dengan memuat indikator keluaran program dan pagu per-OPD, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang telah disesuaikan dengan target kinerja dalam RPJMD perubahan serta kondisi isu strategis lingkungan dalam rangka penanganan covid-19 yang masuk dalam tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Serta Limbah Industri Lain;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023;
25. Keputusan Walikota Nomor: 558/Kep.20.A-DinasLH/I/2017 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis 2019-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2019-2023 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai acuan indikator keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota terpilih.

Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini disusun agar dengan tujuan :

1. Menyamakan persepsi mengenai rencana pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Menjadi pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Menjadi tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan
5. Menjadi acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2019-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisikan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup. Didalamnya dijelaskan pula Indikator tujuan/sasaran serta target kinerja yang akan dicapai.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang beserta relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode Tahun 2019–2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini berisi informasi mengenai rencana program, kegiatan dan besaran pendanaan yang direncanakan untuk periode Tahun 2019–2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019–2023.

Bab VIII Penutup

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi periode tahun 2014-2018 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama periode 2014-2018 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2019-2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama periode 2014-2018 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

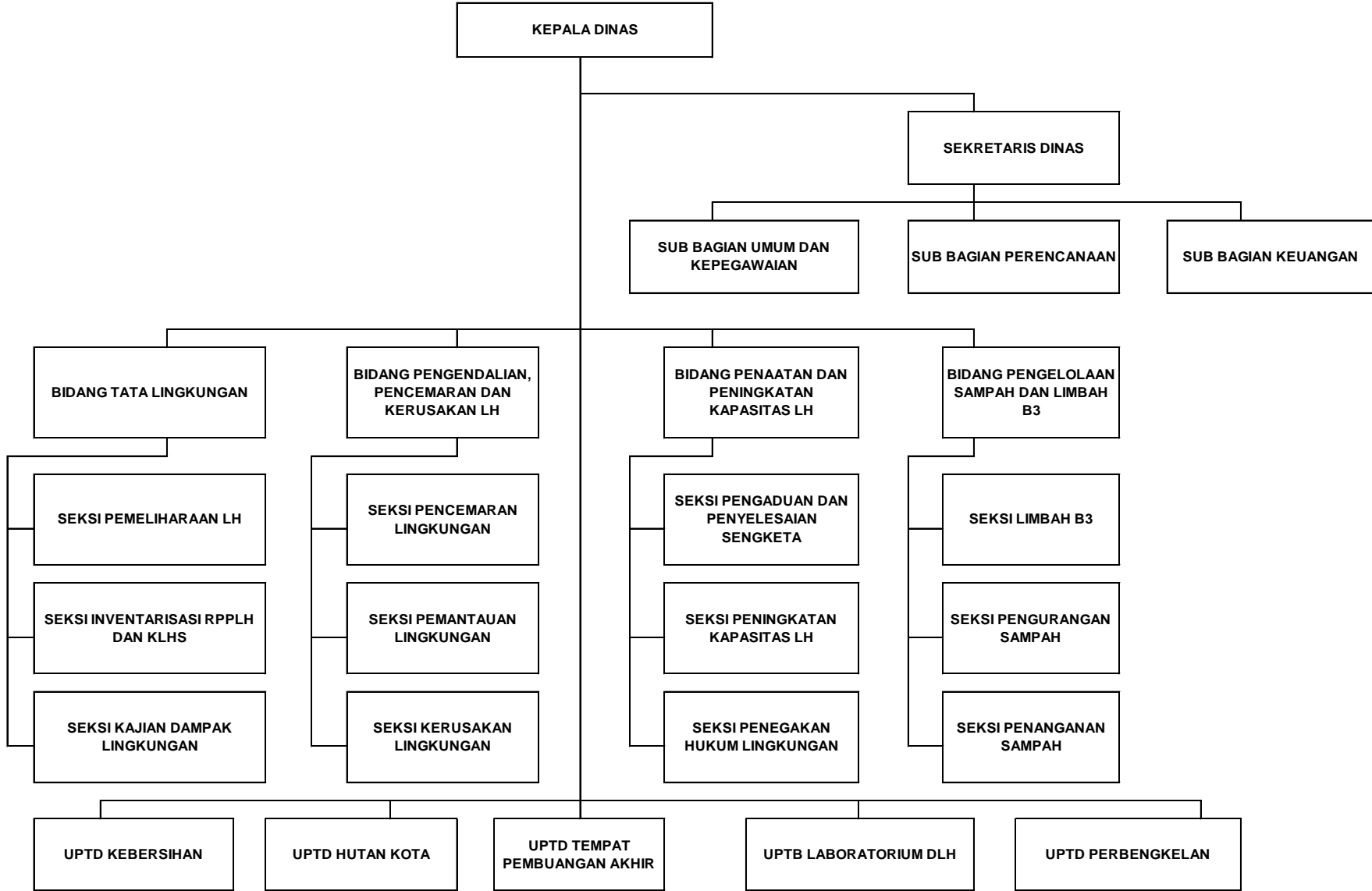
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



2.1.2 Struktur Organisasi

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- d. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang ketahanan pangan;
- e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- h. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- i. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk

naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

- k. Menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
- l. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;
- m. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- n. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- o. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- p. Mengidentifikasi permasalahan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan lingkungan hidup yang meliputi pelaksanaan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- r. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat

maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai kebijakan Wali Kota;

- s. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- t. Membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- u. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- x. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- y. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi inventarisasi RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- d. Penyusunan dokumen RPPLH;

- e. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- k. Penyusunan NSDA dan LH;
- l. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- n. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- p. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- q. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- r. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- s. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- t. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- u. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- v. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- w. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- x. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- aa. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- bb. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- cc. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- dd. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
- ff. Pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- gg. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- hh. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ii. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- jj. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- kk. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- ll. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- mm. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3 untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- d. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- f. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- g. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- i. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- j. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- k. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- l. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- n. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- p. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- q. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- r. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. Pelaksanaan kerjasama dengan kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kota;
- z. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kota;
- aa. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kota;
- bb. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah b3;
- dd. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah b3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kota;
- ee. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah b3 dilakukan dalam satu daerah kota;

- ff. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah b3 medis;
- gg. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah b3;
- hh. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- ii. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
- jj. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- e. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- f. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- g. Penentuan baku mutu lingkungan;
- h. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- m. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- n. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- s. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- t. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- w. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Dinas yang meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- j. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- n. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- o. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- r. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- s. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- w. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- x. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- y. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- aa. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- cc. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- dd. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ff. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- gg. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- hh. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- ii. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- jj. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- kk. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- ll. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- mm. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- nn. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- oo. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- pp. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- qq. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- rr. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya aset/modal serta sumber daya keuangan. Masing-masing sumber daya tersebut akan dijelaskan berikut ini.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh pegawai sebanyak 367 orang PNS (data nominatif Maret 2021). Komposisi dan karakteristik seluruh pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat berdasar golongan, eselon/ jabatan, pendidikan, usia, dan tempat tugas seperti berikut ini.

a. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

Jika dilihat berdasar golongan, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Golongan I, sebanyak 99 orang atau 26,97 % dari total keseluruhan pegawai.
- Golongan II, sebanyak 180 orang atau 49,04 % dari total keseluruhan pegawai.
- Golongan III, sebanyak 72 orang atau 19,61 % dari total keseluruhan pegawai.
- Golongan IV, sebanyak 16 orang atau 4,35 % dari total keseluruhan pegawai.

b. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan

Berdasar jabatannya, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebanyak 1 orang.
- Pejabat Administrator, sebanyak 5 orang.
- Pejabat Pengawas, sebanyak 33 orang.
- Pejabat Pelaksana, sebanyak 314 orang.
- Pejabat Fungsional, sebanyak 14 orang.

c. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Tingkat Pendidikan S-2, sebanyak 25 orang.
- Tingkat Pendidikan S-1/D-4, sebanyak 52 orang.
- Tingkat Pendidikan D-3, sebanyak 6 orang.

Tingkat Pendidikan SLTA ke bawah, sebanyak 284 orang.

d. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tempat Tugas / Unit Organisasi

Berdasarkan tempat tugas/unit kerja, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Bidang Tata Lingkungan, sebanyak 9 orang.
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, sebanyak 10 orang.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebanyak 10 orang.
- Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebanyak 9 orang.
- Sekretariat Dinas, sebanyak 19 orang.
- UPTD Lingkungan Hidup Kecamatan, sebanyak 287 orang.
- UPTD Lingkungan Hidup Jalur Protokol, sebanyak 65 orang.
- UPTD Lingkungan Hidup Jalur Kontainer, sebanyak 15 orang.
- UPTD Lingkungan Hidup TPA Sumur Batu, sebanyak 6 orang.
- UPTD Hutan Kota, sebanyak 9 orang.
- UPTD Laboratorium Lingkungan, sebanyak 4 orang.
- UPTD Perbengkelan, sebanyak 8 orang.

2.2.2 Aset/Modal

Dalam menunjang kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat ini memiliki kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Kondisi Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPL H	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
III	Perahu / Kapal						
1	Palet Perahu	1	1			1	
2	Perahu Karet	4	4			1	3
3	Perahu Fiber	2	2			2	
4	Motor Boat	1	1			1	
IV	Kendaraan Roda 2 (dua)						
1	Sepeda Motor	50	10	11	29	48	2
V	Kendaraan Roda 3 (tiga)						
1	Gerobak Motor (Baktor)	290	4	192	94		
VI	Kendaraan Roda 4 (empat)						
1	Mobil	13	6	2	4	13	
2	Pick Up	41	2	23	16	35	6
VII	Kendaraan Roda 6 (enam)						
1	Arm Roll	62		62		53	9
2	Dump Truck	147		147		106	41
3	Light Truck	8		8		5	3
4	Truck Tangki Air	3	1	2		3	
VIII	Bak Kontainer						
1	Bak Kontainer	251	1	250		164	86
IX	Alat Berat						
1	Buldozer	4		2	2	4	
2	Excavator	7		5	2	5	2
3	Loader	1		1			1
4	Backhoe Loader						
X	Mesin - mesin & Alat - alat						

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
1	Mesin Potong Pohon	6	1		5	6	
2	Mesin Potong Rumput	32	5	9	18	22	10
	Mesin - Mesin Pengolah Sampah						
1	Alat Pemilah Sampah	1		1			
2	Alat pengolah sampah	5		5			
3	Mesin Pengolah Sampah	149	28	121			
4	Mesin Pengolah Sampah Plastik	15	15				
5	Mesin Pupuk / Kompos	27	7	11	9		
4	Mesin Press	1		1			
5	Mesin Biopori	23		23			
	Pompa - pompa						
1	Pompa Air	12	3	3	6	9	3
2	Pompa Oli Tangan	1		1			1
3	Pompa Tabung Pengisian Oli Garden	1		1			1
4	Pompa Centrifugal	3	3			3	
5	Pompa Submersible	3	3			3	
6	Pompa Alcon	1	1			1	
7	Pompa Artesis	4	4			4	
8	Pompa Grase	1		1		1	
9	Pompa Drum	1		1		1	
	Alat Bengkel						
1	Mesin Kompresor	1		1		1	
2	Travo Las Listrik	1		1			
3	Takel	1		1			1
4	Esytilin	1		1			1
5	Tabung Angin (CO ²)	2		2			2
6	Crane	1		1			1
7	Gunting Potong Duduk	1		1			1

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
10	Alat Pemadam Kebakaran	1		1			1
11	Genset	1	1			1	
12	Aspirating aerator kincir	1		1			1
13	Meter Air	1		1			1
14	Tabung Gas	3		3			3
15	Timbangan	1			1		
16	PS	15	11		4	15	

Sedangkan jenis dan jumlah peralatan/perlengkapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Operasional

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
1	Meja						
	1. Meja Resepsionis	1		1			1
	2. Meja Kerja	211	74	137		115	96
	3. Meja Komputer	10		10		2	8
	4. Meja Rapat	4	3	1		1	3
2	Kursi						
	1. Kursi Kerja	149	35	79	35	101	48
3	Telepon	1		1		1	
4	Handy Talky	12	2	10		5	7
5	Mesin Fax	1		1			
6	Mesin Foto Copy						
7	Mesin Ketik						
	1. Mesin Ketik Manual	5	1	4		1	4
	2. Mesin Ketik Elektronik	24	6	18		22	2
8	Mesin Hitung Uang	1		1		1	
9	Komputer	94	28	56	10	61	33
10	UPS	15	1	14		6	9
11	Lap Top	24	14	9	1	14	10

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
12	Hard Drive External	12	10	2		12	
13	Projektor / Infocus	5	3	1	1	5	
14	Layar Projektor / Infocus	1	1			1	
15	Alat Pengeras Suara	5	4	1		4	1
16	Pemindai / Scanner	1			1	1	
17	Printer	84	19	55	10	42	42
18	Kamera	18	8	6	4	11	7
19	Handy Cam	2	2			2	
20	Alat Penghancur Kertas	10	3	5	2	3	7
21	Filling Besi / Cabinet	44	15	29		27	17
22	Lemari Besi	73	24	49		45	28
23	Lemari Kayu	8	1	1	6	6	2
24	Lemari Kaca	1		1		1	
	Brankas						
25	Rak	14	7	7		12	2
26	Dispenser	2		2		1	1
27	Kulkas	1		1		1	
28	Sofa	9	4	5		7	2
29	Televisi	2		1	1	1	1
30	Moubiler	2	1	1		1	1
31	Cermin	1		1			1
32	Mesin Absensi	20		1	19	18	1
33	Air Conditioner (AC)	17	2	15		8	9
34	Kipas Angin / Exhaust	14	4	10		8	6
35	CCTV	5	2	3		2	3
36	Drone	1			1	1	

Sedangkan jenis dan jumlah aset tidak bergerak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Aset Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
	Tanah						
1	Tanah / Danau	1		1			
2	Tanah TPA	4		4			
	Gedung dan Bangunan						
1	Bak Penampungan Sampah	4		4		4	
2	Tempat Pembuangan Sampah	3	1	2		2	1
3	Transfer Depo	4		4		1	3
4	Landasan Kontainer	25		25		5	20
5	Paving Block	2	2			2	
6	Bank Sampah	1		1			
7	Rumah Kompos	18	11	11			
8	Auning Pemilahan Sampah	1		1		1	
9	Stasiun Peralihan Antara	2		2		2	
	Bangunan di UPTD Perbengkelan						
10	Pool	2		2		2	
11	Emplasement	1		1		1	
12	Pagar	1		1		1	
13	Hanggar	1		1		1	
14	Pengecoran Jalan	1		1		1	
	Bangunan di UPTD TPA Sumur Batu						
15	Pintu Gerbang	1		1			1
16	Gapura	1		1			1
17	Taman	1		1			1
18	Konstruksi Hanggar Kompayer Sampah	1		1			1
19	Perencanaan IPAS (Instalasi Pengelolaan Air Sampah)	1		1		1	

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
20	Jembatan Timbang	3		3		1	
21	Pagar - pagar	6		6		6	
22	Pos Ritase	1		1			1
23	TPA Zona 5	1		1		1	
	Bangunan di UPTB Laboratorium Lingkungan						
24	Gedung Laboratorium	2	2			2	
25	Pagar	1	1			1	
26	Pengelolaan Limbah	1	1			1	
	Bangunan di UPTD Taman dan Hutan Kota						
27	Pos	4	4			4	
28	Sarana Olah Raga	2	2			2	
29	Taman Hijau	1	1			1	
30	Tiang Lampu	1	1			1	
31	Air Mancur	1	1			1	
32	Musholah	1	1			1	
33	Pagar	2	2			2	
34	Tugu - tugu	15	15			15	
	Bangunan Kantor Dinas						
35	Ruang Aula / Rapat	1	1			1	
36	Gudang	1	1			1	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Landasan Kontainer	1		1		1	
2	Tempat Penampungan Sampah	9		9			
3	Rumah Kompos	1		1			
4	Sumur Resapan	28	106		50		
5	Instalasi Listrik	1	1			1	
	Jalan / Jaringan di TPA Sumur Batu						
6	Geomembrane	1		1		1	
7	Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS)	2		2		2	
8	Pengelolaan Air Sampah / Limbah	2		2			2

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
9	Instalasi Listrik dsb.						
	Tiang Kabel	2		2			2
	Panel Pompa	1		1			1
	Kabel	2		2			2
	Panel Distribusi	1		1			1
	Instalasi Listrik	3		3		1	2
10	Zona TPA						
	Jalan / Jaringan di UPTB Laboratorium Lingkungan						
11	Instalasi Listrik dsb.	1	1			1	
	Jalan / Jaringan di UPTD Taman dan Hutan Kota						
12	Tandon Air	1	1			1	
13	Lampu - lampu Penerangan	8	8			8	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini diuraikan mengenai realisasi indikator kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2013-2018 :

2.3.1 Realisasi Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dinilai melalui pengukuran realisasi program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RPJMD 2013-2018 lalu, kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi terkait urusan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura. Kebijakan umum tersebut dituangkan dalam beberapa program, yaitu

- Program Penaatan dan Penegakan Hukum

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air
- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan

Oleh karena itu kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan realisasi pencapaian target program-program yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup 2 (dua) tahun terakhir 2017-2018.

2.3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Dinas LH Tahun 2017

1. Kinerja Program Penataan dan Penegakan Hukum

Indikator kinerja Program Penataan dan Penegakan Hukum adalah persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Tahun 2017, target penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100%. Realisasinya, dari 33 kasus pengaduan yang masuk seluruhnya sudah ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa target Tahun 2017 tercapai 100%.

2. Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah meningkatnya status mutu udara dengan satuan Ug/m³ (semakin tinggi Ug/m³ maka kualitas udara semakin buruk).

Target status mutu udara pada tahun 2017 untuk parameter debu adalah 184 Ug/m³, realisasinya adalah 333 Ug/m³, Hal ini menunjukkan bahwa target 2017 masih belum dapat tercapai.

3. Kinerja Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air

Indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air adalah status meningkatnya mutu air.

Target status mutu air tahun 2017 adalah 3,2 (tercemar ringan) dari skala interval 0 - 1 (terbaik) sampai dengan interval > 10 (terburuk/tercemar berat). Realisasinya adalah status mutu air Kota Bekasi Tahun 2017 mencapai 6,44 (interval 5 – 10 tercemar sedang). Hal ini menunjukkan bahwa target 2017 masih belum dapat tercapai.

4. Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah persentase penanganan sampah.

Target persentase penanganan sampah tahun 2017 adalah 66%, realisasinya mencapai 63,79%. Hal ini menunjukkan bahwa target 2017 belum dapat terpenuhi.

5. Kinerja Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Indikator kinerja Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) adalah persentase luasan ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan.

Sampai dengan tahun 2017 luasan RTH yang ada di Kota Bekasi mencapai 11%, sedangkan untuk target pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu dengan penanaman pohon sebanyak 5000 pohon. Tahun 2017, telah dilakukan penanaman sebanyak 2.150 pohon atau 43%.

2.3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Dinas LH Tahun 2019

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Piala Adipura

Pada periode tahun 2017-2018, Kota Bekasi hanya memperoleh nilai P2 hanya sebesar 72,80 sehingga tidak dapat memenuhi kriteria nilai yang ditentukan untuk memperoleh Piala Adipura. Upaya untuk mencapai perolehan nilai P2 telah dilakukan yaitu optimalisasi kegiatan penanganan dan pengangkutan sampah di lajur protokol, jalur utama, perumahan, dan pasar.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah penanganan dan pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu belum maksimal. TPA sumur batu dinilai tidak memenuhi syarat teknis suatu TPA Sampah karena dianggap Open dumping sehingga berpotensi dalam mencemari lingkungan, baik itu dari pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah), lalat, bau serta binatang seperti tikus, kecoa, nyamuk dll.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		Keterangan
		Target RPJMD	Capaian	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Piala Adipura	Adipura	Tidak ada	Belum tercapai

Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk tahun berikutnya mengenai Pengelolaan sampah dengan cara sanitary landfill yaitu dengan cara sampah ditimbun di TPA sampah lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti bulldozer maupun track loader, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Hal ini dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

1. Rehabilitasi zona TPA ataupun penambahan lahan tpa
2. Pengadaan sarana dan prasarana alat pengangkutan sampah baik di tps maupun TPA.
3. Menerapkan dan memanfaatkan teknologi dalam mengolah sampah di TPA.
4. Melibatkan peranserta masyarakat dalam mengurangi sampah melalui pengelolaan 3R dan Bank Sampah.

2. Status Mutu Udara Ambien

Sasaran		Tahun 2018	Keterangan
---------	--	------------	------------

	Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status Mutu Udara	172.5 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Tidak tercapai

Pemantauan dilakukan di 25 titik yang dilaksanakan sebanyak 2 periode pengambilan, hasil pengujian kualitas udara ambient meliputi arah angin, kecepatan angin, kelembaban, dan temperatur di 25 titik tersebut. Seluruh nilai dari parameter pengujian kualitas udara ambient seperti SO_2 , CO, NO_2 , HC, O_3 dan Timbal (Pb) diseluruh titik pemantauan masih berada di bawah baku mutu.

Parameter yang dijadikan indikator dalam menentukan status mutu udara ambient adalah TSP (debu). Dari 25 titik pengujian, terdapat 4 titik lokasi pengujian yang nilai TSPnya melebihi baku mutu, karena titik lokasi tersebut merupakan jalur lalu lintas padat merayap dan cenderung mengalami kemacetan. Namun hasil pemantauan pada periode I dan periode II tahun 2018 ini kualitas udara ambient Kota Bekasi secara umum dapat dikatakan aman dari polutan.

Berdasarkan RPJMD 2013-2018 target yang harus dicapai tahun 2018 adalah 172.5 Ug/m^3 , sedangkan hasil pengujian kualitas udara ambient dengan parameter debu tertinggi adalah sebesar 200 Ug/m^3 namun masih dibawah standar baku mutu udara yaitu TSP 230 Ug/m^3 .

Dalam upaya menjaga kualitas udara dengan mengurangi pencemaran udara maka perlu dilakukan hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan pengujian kondisi udara secara kontinyu dengan menggunakan *air quality monitoring system* (AQMS) untuk mengetahui kualitas udara dan memberikan

informasi langsung kepada masyarakat. Hasil pemantauan dan pengujian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran udara.

2. Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon yang dapat menyerap jumlah polutan dan mereduksi tingkat pencemar udara.

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n- 2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Penegakan hukum	√	√	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Kasus 28 (28 Kasus selesai) di tangani, capaian Kinerja Penegakan Hukum =Jumlah Kasus yang ditangani /seluruh Jumlah Kasus yang masuk
2	Status Mutu Udara	√		172,5 Ug/m ³	Baik	IKU 82	Baik	200 Ug/m ³	IKU 78,47	Belum tercapai
3	Status Mutu Air	√		Kelas 3	Kelas 3	Kelas 3 (IP1-5)	Kelas 3 (IP 1-5)	Kelas 3	Kelas 3	target mutu air tercapai

4	Ruang terbuka hijau		√	5000	5000	5000	5000	1600	-	<i>Refocusing</i> anggaran untuk penanaman covid
5	Penanganan Sampah		√	66%	69%	94%	92%	67,15%	63,4%	Mulai tahun 2019 target Persentase Pengelolaan Timbulan sampah yang ditangani
6	Perolehan Adipura			1 Piala Adipura	1 Piala Adipura			Tidak Lolos P2	-	Belum Tercapai

3. Status Mutu Air

Pengujian kualitas air dilakukan dengan pengambilan sampel air sungai di 50 titik meliputi sungai, kali dan saluran. Salah satu ruas sungai yang menjadi perhatian adalah Kali Bekasi, hal ini karena seringnya kasus pencemaran air yang terjadi akibat ketidakpatuhan pelaku usaha/kegiatan yang membuang air limbah langsung ke sungai. Selain itu, Kali Bekasi juga bersinggungan langsung dengan Kali Cileungsi.

Titik pengujian yang sering terjadi kasus pencemaran berada di Kali Bekasi (Jembatan Cipendawa), karena ruas sungai berdekatan dengan usaha/kegiatan yang sering kali membuang air limbah produksi langsung ke sungai. Hasil Pengujian indeks pencemar di Kali Bekasi jembatan cipendawa untuk tahun ini adalah IP 1,53 atau cemar ringan.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		Keterangan
		Target RPJMD	Capaian target	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status Mutu Air	Kelas 3	Kelas 3 (IP 1,53)	Tercapai

Kendala yang dihadapi dalam menjaga kualitas air sungai adalah masih adanya pelaku usaha/kegiatan yang membuang air limbah produksinya langsung ke sungai, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Untuk mengantisipasi kendala diatas, DLH berupaya melakukan hal sebagai berikut:

1. Penertiban ijin lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan penerima ijin lingkungan yang mempunyai potensi dampak negatif terhadap lingkungan,

- 2. Melakukan pengujian kualitas air sungai maupun pengujian inlet outlet sumber pencemar secara kontinyu
- 3. Pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan pencemaran
- 4. Respon cepat oleh Tim URC terhadap pengaduan masyarakat terkait kasus pencemaran air
- 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum

4. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau perkotaan, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya penanaman pohon di area terbuka hijau yaitu taman hutan kota, taman alun-alun, dan taman kota. Pemanfaatan RTH dengan penanaman pohon ini memberikan kontribusi positif bagi lingkungan yaitu menambah nilai estetika, mereduksi zat polutan dan mengurangi partikel debu, dan menjaga kualitas air tanah.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		Keterangan
		Target RPJMD	Capaian target	
Meningkatkan kualitas lingkungan	Tersedianya ruang terbuka hijau perkotaan	5000	1.600	Belum tercapai

Rencana target penanaman pohon adalah 5000 pohon setiap tahunnya, namun karena keterbatasan anggaran di tahun 2018, bibit pohon yang terealisasi sebanyak 1.600 bibit pohon yaitu 900 pohon endemik dan 700 pohon pelindung. Pohon tersebut ditanam secara sporadis yaitu di area sekolah dan area fasilitas umum perumahan.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi di dalam Buku Bekasi Dalam Angka (BDA), luas RTH sampai dengan tahun 2018 sekitar 22% dr luas Kota Bekasi, sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan ideal RTH 30% masih belum terpenuhi. Menciptakan ruang terbuka hijau memiliki keuntungan untuk membantu menurunkan suhu udara kota, menyerap gas polutan, meredam pemanasan global dan radiasi sinar matahari, dan membantu meredam tingkat kebisingan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Menambah luasan RTH untuk memberikan ruang bagi pemanfaatan RTH dengan cara penghijauan
2. Upaya alternatif seperti rumah dan sekolah hijau serta optimalisasi atap bangunan sebagai taman atap (*roofgarden*) atau atap rumput yang dapat memberikan nilai ekologis dan estetika
3. Melibatkan peranserta masyarakat untuk turut memelihara dan menjaga lingkungan.

5. Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual yaitu melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, maupun pidana. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan ketaatan dan kepatuhan para pelaku jenis usaha/kegiatan sesuai dengan kebijakan, aturan dan prosedur hukum lingkungan yang berlaku.

Tahun 2018, jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan adalah sebesar 18 kasus pengaduan, sedangkan tindaklanjut hasil monitoring evaluasi terhadap penerima ijin

lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 50 kasus pelanggaran.

Kasus pengaduan yang disampaikan melalui media sosial dan surat yang diterima meliputi kasus pencemaran udara, sampah liar, polusi suara, pembuangan limbah cair industri, segera ditindaklanjuti oleh Tim Unit Reaksi Cepat DLH dengan bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum yaitu POLRI.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		Keterangan
		Target RPJMD	Capaian target	
Meningkatkan kualitas lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	Penyelesaian kasus pengaduan dan pelanggaran

Terwujudnya pengelola sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat

6. Persentase Penanganan Sampah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan, DLH telah berupaya meningkatkan kinerja petugas kebersihan, sarana dan prasarana seperti alat bantu kebersihan di tiap-tiap upkd kebersihan dan armada pengangkutan sampah, walaupun kebutuhan tenaga kerja serta sarana prasarana tersebut belum dipenuhi atau memadai karena keterbatasan anggaran.

Jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2018 diperkirakan mengalami pertambahan penduduk sebesar 3% dari jumlah penduduk tahun 2017 yaitu 2.487.540 jiwa, sehingga diperkirakan jumlah volume sampah Kota Bekasi tahun 2018 adalah 726.362 ton. Tahun 2018, jumlah armada angkutan sampah belum ada penambahan masih sebanyak 205 unit dan hanya dilakukan perbaikan/perawatan untuk mengoptimalkan pengangkutan/ penanganan sampah. Metode penghitungan penanganan sampah berdasarkan pedoman LPPD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total kapasitas truk}}{\text{Volume sampah}} = \frac{615.000}{726.362} \times 100\% = 84.67\%$$

Proses penanganan sampah dititikberatkan pada kegiatan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPA, sedangkan proses pengurangan sampah belum dapat dilakukan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan sampah melalui Bank Sampah.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		Keterangan
		Target RPJMD	Capaian target	
Terwujudnya pengelola sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat	Persentase penanganan sampah	69%	84,67%	Tercapai

Kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan sampah adalah:

1. Belum tersedianya lahan baru sebagai zona baru yang menyebabkan terbatasnya daya tampung sampah yang diangkut ke TPA.
2. Kurangnya tenaga kerja dan armada pengangkut sampah
3. Kurangnya sarana dan prasana alat kebersihan
4. Kurangnya upaya perlindungan terhadap kesehatan tenaga kerja kebersihan
5. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengelola sampah di TPA
6. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi yang berpengaruh terhadap penambahan sampah domestik.

Tindak lanjut penanganan sampah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah :

1. Penambahan zona baru
2. Rehabilitasi zona
3. Penambahan sarana dan prasarana di TPA sumur baru
4. Penerapan teknologi dalam mengelola dan mengolah sampah
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala bagi tenaga kerja kebersihan
6. Penambahan alat kebersihan untuk menunjang kinerja tenaga kebersihan
7. Sosialisasi atau penyadartahuan masyarakat mengenai pengolahan, pemanfaatan dan pengurangan sampah melalui Bank Sampah.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada level program, akan dianalisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2017-2018

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
		2017	2018	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	5.948.000.000	5.577.250.000	93,96	94,22
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.085.000.000	580.000.000	80,25	16,37

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	455.000.000	387.500.000	99,52	94,32
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	0,00	32,00	0,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	406.500.000	123.155.000	99,54	13,14
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	105.793.970.000	119.269.990.000	75,99	68,29
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	8.089.480.000	16.153.769.000	64,39	37,75
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.899.108.700,	3.340.000.000	93,33	14,56
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	550.000.000	536.060.000	90,23	71,58
10	Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	775.000.000	529.000.000	92,95	9,79
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.000.000.000	0,00	3,35	0,00

	TOTAL	136.027.058.700	146.496.724.000		
--	-------	-----------------	-----------------	--	--

Berdasarkan uraian pada realisasi indikator kinerja dan realisasi anggaran, terinformasikan bahwa belum semua target kinerja tercapai. Target kinerja yang belum tercapai tersebut adalah pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air, dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Adapun faktor permasalahan utama yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja program tersebut adalah masih sangat terbatasnya dukungan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup apabila dibandingkan dengan beban atau jumlah obyek dan ruang lingkup wilayah kerja, serta masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional. Sedangkan target kinerja yang tercapai adalah pada Program Penegakan Hukum dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang mencapai 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pelayanan dan pencapaian program, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menemui tantangan dan peluang.

Potensi tantangan utama yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan layanan adalah peningkatan jumlah penduduk. BPS Kota Bekasi memproyeksikan pada Tahun 2019 jumlah

penduduk Kota Bekasi menjadi sebanyak 2,943,859 jiwa. Pada Tahun 2020 menjadi 3,013,851 jiwa, dan pada Tahun 2021 menjadi 3,083,644 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat berpotensi mendorong antara lain peningkatan jumlah sampah, peningkatan pembangunan perumahan, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan jumlah usaha industri/UKM, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan maupun meningkatnya volume sampah.

Dari sisi pemeliharaan lingkungan hidup, tantangan yang dihadapi adalah:

- Kecenderungan semakin menurunnya kesadaran perusahaan untuk taat aturan lingkungan. Pada tahun 2017 terdapat 167 perusahaan yang dinilai taat pada aturan lingkungan. Jumlah ini turun daripada Tahun 2016 yaitu 199 perusahaan yang taat lingkungan, terlebih apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu 269 perusahaan yang taat peraturan lingkungan.
- Tantangan lain terkait pemeliharaan lingkungan adalah belum berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan. Hal ini terindikasi dari tidak berkembangnya inisiasi masyarakat untuk mewujudkan kampung iklim, karena hingga tahun 2017 jumlah kampung iklim tidak bertambah yaitu hanya ada 3 (tiga) kampung iklim, yang ketiganya terbentuk pada tahun 2015.
- Masih terkait masyarakat, khususnya dari sisi lembaga pendidikan, tantangan yang dihadapi adalah relatif tidak berkembangnya jumlah sekolah adiwiyata. Pada tahun 2017, sekolah dengan status sekolah adiwiyata tingkat Kota jumlahnya tetap apabila dibandingkan tahun 2016, yaitu sebanyak 12 sekolah. Penurunan terjadi pada jumlah sekolah yang berstatus sekolah adiwiyata tingkat provinsi, yaitu sebanyak 8 sekolah dari sebelumnya 9 sekolah. Bahkan sejak tahun 2016 di Kota Bekasi tidak terdapat lagi sekolah yang berstatus sekolah adiwiyata tingkat nasional dan mandiri. Dari sisi penanganan

persampahan, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Jumlah timbunan sampah pada Tahun 2017 saja sudah mencapai 2.095.932 m³, sedangkan sampah yang dapat diangkut ke TPA hanya sekitar 1.312.315 m³, pertahun. Jika pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri masih kurang, maka pada Tahun 2018-2023 jumlah timbunan sampah akan semakin meningkat.
- Beberapa indikasi dari masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah hingga tahun 2017, masih sangat sedikitnya tempat pengolahan sampah terpadu (1 lokasi), sedikitnya tempat pengolahan sampah dengan pendekatan 3R (1 lokasi), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif (696 tidak aktif dari 919 bank sampah yang terdaftar).

Dari sisi hubungan kerja dengan instansi terkait baik secara horisontal maupun vertikal, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :

- Koordinasi dengan provinsi dan instansi terkait belum optimal
 - Adanya kepentingan pembangunan sektor lain yang terkadang berlainan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup
- Disamping tantangan, ada beberapa faktor eksternal yang dapat dipandang sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan dan terus dikembangkan dalam rangka pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan persampahan. Peluang tersebut adalah masih adanya dukungan swasta dan sebagian masyarakat, serta dukungan kebijakan seperti antara lain
- adanya dukungan keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan penghijauan melalui pemberian dan penanaman pohon pelindung dan produktif, maupun melalui pendanaan alternatif dari pihak swasta berupa program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk bidang lingkungan hidup

- dukungan terhadap kegiatan *car free day* pada setiap hari Minggu untuk mengurangi beban pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor, yang diikuti dengan kegiatan pungut sampah oleh warga masyarakat.
- Menguatnya relawan dan gerakan peduli lingkungan yang ada di kota bekasi dalam bentuk yayasan atau organisasi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat dikelola lebih baik dan terkoordinasi, serta dapat membangun kerjasama secara mandiri dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan besar, maupun masyarakat pada umumnya.
- Sudah relatif tersebar nya cikal bakal bank-bank sampah di seluruh kelurahan, meskipun belum semuanya berjalan aktif dan optimal
- Cukup banyaknya program pemerintah pusat/provinsi terkait pemberdayaan/peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pelibatan masyarakat Kota Bekasi dalam pemeliharaan lingkungan.

Secara ringkas, tantangan dan peluang pelayanan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dimaksud dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 Identifikasi Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas

Tantangan	Peluang
<p>Terkait pemeliharaan lingkungan: menurunnya kesadaran perusahaan untuk taat aturan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan. • relatif tidak berkembang sekolah adiwiyata. <p>Terkait Pengelolaan persampahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • adanya dukungan keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan penghijauan melalui pemberian dan penanaman pohon pelindung dan produktif, maupun melalui pendanaan alternatif dari pihak swasta berupa program corporate social responsibility (CSR) untuk bidang lingkungan hidup • dukungan terhadap kegiatan <i>car free day</i> pada setiap hari Minggu untuk mengurangi beban pencemaran udara dari emisi

Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none">• jumlah timbunan sampah yang akan semakin meningkat.• masih sangat sedikitnya tempat pengolahan sampah oleh masyarakat <p>Terkait Hubungan kerja antar instansi/lembaga</p> <ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dengan provinsi dan instansi terkait belum optimal• Adanya kepentingan pembangunan sektor lain yang terkadang bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup	<p>kendaraan bermotor, yang diikuti dengan kegiatan pungut sampah oleh warga masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menguatnya relawan dan gerakan peduli lingkungan yang ada di kota bekasi dalam bentuk yayasan atau organisasi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat dikelola lebih baik dan terkoordinasi, serta dapat membangun kerjasama secara mandiri dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan besar, maupun masyarakat pada umumnya.• Sudah relatif tersebar cikal bakal bank-bank sampah di seluruh kelurahan, meskipun belum semuanya berjalan aktif dan optimal• Cukup banyaknya program pemerintah pusat/provinsi terkait pemberdayaan/peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pelibatan masyarakat Kota Bekasi dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, tugas dan fungsi utama pelayanan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan :

- 1. Penataan Lingkungan
- 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 4. Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Gambaran masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.1
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Lambatnya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi	Penataan Lingkungan	
		Penataan lingkungan yang telah dilaksanakan belum dapat berjalan dengan optimal	<ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam masih sangat terbatas• Belum ditetapkannya dokumen RPPLH dan KLHS yang telah tersusun• Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup belum tersusun berdasarkan data

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>dan informasi yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kordinasi penyusunan tata ruang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal • Belum tersedianya beberapa dokumen/instrumen/indeks terkait penataan dan pemeliharaan lingkungan
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dilaksanakan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi data dan informasi pencemaran dan kerusakan lingkungan (air, udara, dan tanah) masih sangat terbatas • Pemantauan kualitas air, udara, dan tanah yang telah dilaksanakan masih terbatas • Penanganan pencemaran lingkungan yang telah dilaksanakan masih sangat terbatas apabila dibandingkan tingkat pencemaran lingkungan yang ada • Pemulihan kerusakan lingkungan yang telah dilakukan masih sangat terbatas
		Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang telah dilakukan belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengaduan dan sengketa Lingkungan yang telah dilakukan masih sangat terbatas • Pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>hasil evaluasi oleh penerima izin lingkungan masih sangat terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang telah dilakukan masih sangat terbatas
2	Lambatnya peningkatan kualitas penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah dan Limbah B3 yang telah dilaksanakan belum dapat berjalan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi data dan informasi produksi sampah dan limbah B3 masih sangat terbatas • Pembinaan yang telah dilakukan dalam rangka upaya pengurangan sampah belum menunjukkan hasil yang signifikan • Penanganan sampah yang telah dilakukan masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi sampah • Pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan masih sangat terbatas
3.	Pengembangan Organisasi Dinas	Pengelolaan Organisasi	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan organisasi yang telah dilakukan belum berjalan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumber daya organisasi tersedia belum terkoordinasi secara sistematis • Perencanaan dan pelaporan yang telah dilaksanakan belum terintegrasi dalam sistem yang saling menunjang pelaksanaan tugas fungsi antar bidang • Administrasi pengelolaan sumber daya organisasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			yang telah dilaksanakan belum berjalan secara tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya dukungan semua instansi pemerintah daerah termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Misi : Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
2. Misi : Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Program prioritas pembangunan 2019-2023 Kota Bekasi yang menjadi tanggung jawab langsung Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Pengembangan Sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
2. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
3. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “*Smart Waste Management*”, dan konversi “*Waste Energy*”.

Sedangkan program prioritas pembangunan 2019-2023 Kota Bekasi yang secara tidak langsung terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau dengan kata lain turut terlibat dalam pelaksanaannya adalah :

1. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “*Bekasi City Techno Park*”;
2. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dan lain-lain);
3. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
4. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan			
No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
1.	Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya prasarana dan sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang selama ini telah dilaksanakan • Belum optimalnya prasarana dan sarana Pengelolaan sampah dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan penghijauan melalui pemberian dan penanaman pohon pelindung dan produktif, maupun melalui pendanaan alternatif dari pihak swasta berupa program corporate social responsibility (CSR) untuk bidang lingkungan hidup • Menguatnya relawan dan gerakan peduli lingkungan yang ada di kota bekasi dalam bentuk yayasan atau organisasi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang

		<p>Limbah B3 yang telah dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya prasarana dan sarana Pengelolaan organisasi yang telah dilakukan	<p>dilakukannya dapat dikelola lebih baik dan terkoordinasi, serta dapat membangun kerjasama secara mandiri dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan besar, maupun masyarakat pada umumnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sudah relatif tersebar cikal bakal bank-bank sampah di seluruh kelurahan, meskipun belum semuanya berjalan aktif dan optimal
2.	<p>Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman</p>	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya penataan lingkungan hidup yang selama ini telah dilaksanakan• Belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan program pemerintah pusat/provinsi terkait pemberdayaan/peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pelibatan masyarakat Kota Bekasi dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah• Adanya dukungan terhadap kegiatan car free day pada setiap hari

			Minggu untuk mengurangi beban pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor, yang diikuti dengan kegiatan pungut sampah oleh warga masyarakat.
--	--	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, akan terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/lembaga tingka pusat dan perangkat daerah lainnya baik di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, maupun perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintahan daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

a. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga Tingkat Pemerintahan Pusat

Kementerian/Lembaga pemerintahan pusat yang program kegiatan dalam sasaran jangka menengahnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, antara lain :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
- b) Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung,

pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

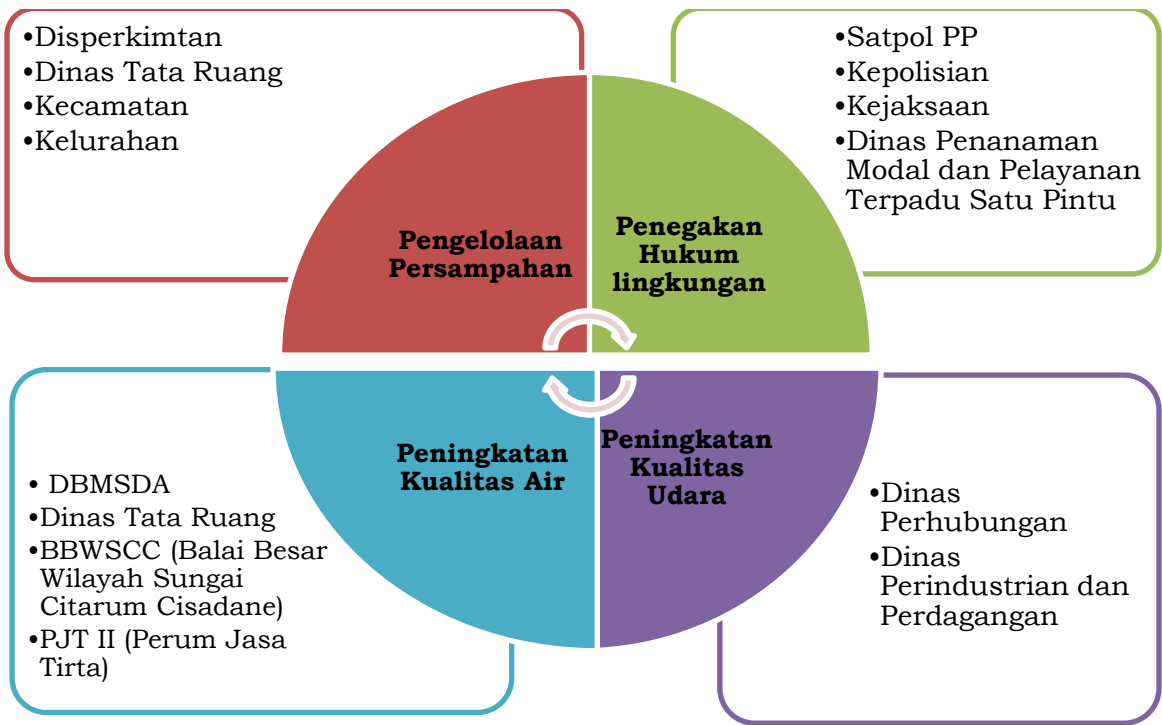
- c) Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.

Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

b. Keterkaitan dengan Perangkat Daerah

Pada tingkat Kota Bekasi, dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Keterkaitan dengan Perangkat Daerah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup



a. Keterkaitan dengan Perangkat Daerah sejenis/serupa lain di lingkungan Pemerintahan Daerah lain di sekitar Kota Bekasi

Pada tingkat keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan dinas-dinas serupa pada pemerintahan daerah lain di sekitar Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Jangka Menengah Dinas Terkait Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah sekitar

No	Program/Tujuan/Sasaran Dinas terkait Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah sekitar Kota Bekasi
1	Provinsi DKI Jakarta,

	<p>Program Prioritas DLH Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan RPPLH, KLHS Pantura dan KLHS RPJMD2. Penyusunan RPJMD3. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah4. Pengelolaan informasi lingkungan dan kebersihan5. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim6. Pengurangan dan penanganan sampah7. Penanganan limbah B3 dari fasilitas kesehatan tingkat dasar, kegiatan usaha skala kecil dan rumah tangga8. Pengembangan pengelolaan kebersihan9. Pemantauan kualitas lingkungan10. Penilaian dokumen lingkungan11. Konversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan operasional Dinas12. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor13. Penanganan pengaduan kasus lingkungan dan kebersihan14. Pengawasan pencemaran lingkungan terhadap kegiatan usaha15. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan dan kebersihan16. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan17. Pengembangan kemitraan lingkungan dan kebersihan18. Pengembangan Bank Sampah19. Pelaksanaan Program Adipura, Adiwiyata, Program Kampung Iklim, Kalpataru dan Saka Kalpataru20. Pengembangan peningkatan peran dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan21. Peningkatan penanganan sampah di badan air22. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA23. Peningkatan pelayanan uji laboratorium lingkungan24. Peningkatan penerimaan retribusi
2.	<p>Provinsi Jawa Barat</p> <p>Tujuan DLH Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Visi yang ada adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (Aparat, dunia pendidikan, dunia usaha, LSM, dan masyarakat)2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan3. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan4. Meningkatkan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati

	<p>5. Meningkatkan pemantauan dan upaya pembinaan/pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3</p> <p>6. Meningkatkan peranan laboratorium penguji kualitas lingkungan yang terakreditasi</p> <p>7. Mengamankan upaya pelestarian kawasan lindung</p> <p>8. Meningkatkan upaya pengendalian ekosistem pesisir dan laut</p> <p>Sementara itu, Sasaran DLH Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Misi yang ada adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran air melalui Prokasih 2. Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran air di Jawa Barat berbasis GIS 3. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran udara 4. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran limbah B3 dan Tanah 5. Terwujudnya pelestarian keanekaragaman Hayati di Jawa Barat 6. Tersusunnya Pola Kompensasi Pasca Produksi terhadap pengelola lingkungan 7. Tertatanya Landfeel Closure di Jawa Barat 8. Tertatanya Pasca Penambangan Galian C di Jawa Barat 9. Tercapainya Penyelesaian masalah lingkungan di Jawa barat 10. Terjadinya peningkatan kinerja Lab Lingkungan Terakreditasi 11. Terselenggaranya Sosialisasi Environment Polution Control Managment 12. Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan pesisir melalui Peningkatan Peranserta masyarakat & kemampuan aparat pengelola lingkungan 13. Terjadinya pnerapan dan peningkatan Kapasitas AMDAL melalui fasilitasi dan pembinaan teknis AMDAL di Jawa Barat 14. Terwujudnya peningkatan Kemitraan lingkungan di Jawa Barat 15. Tersusunnya feasibility study pemanfaatan gas metan dari dampak di TPA se Jawa Barat 16. Tersusunnya feasibility study Clean Development Mecanism (CDM) di Jawa Barat 17. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penerapan audit produksi bersih untuk industri tekstil 18. Tersusunnya Study kelayakan Pengelolaan limbah rumah sakit secara terpadu 19. Tersusunnya Raperda Pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat 20. Terlindungi dan termanfaatkannya kawasan hutan, lahan & Sumber Daya Air di Jawa Barat
3.	Kabupaten Bogor

Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan Batas wilayah Kota Bekasi adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°48’28”- 107°27’29” Bujur Timur dan 6°10’6”- 6°30’6” Lintang Selatan.

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar, dengan kemiringan antara 0–2 %. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede. Sedangkan ketinggian antara 25–100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih.

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering merupakan langganan genangan, yaitu di Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat),

Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojongmenteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga)sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air.

Tabel 3.4
Daftar Sungai Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit m ³ /dtk	
1.	Kali Cikeas	17,479	10.00	24.00	30.00	5.90	250.00
2.	Kali Cilengsi	19,800	10.00	40.00	30.00	8.50	350.00
3.	Kali Bekasi Hulu	11,425	10.00	50.00	30.00	14.40	375.00
4.	Kali Bekasi Hilir	17,675	10.00	50.00	30.00	12.00	450.00
5.	Kali Sunter	22,682	2.00	12.00	10.00	3.60	14.63
6.	Kali Cakung	29,129	2.00	7.00	6.00	3.00	16.25
7.	Kali Jambe – Kali Siluman	14,076	2.40	8.00	7.00	1.20	18.75
8.	Kali Blencong	4,200	2.50	8.00	7.00	1.50	12.00
9.	Kali Sasak Jarang/Narogong	1,003	1.70	6.00	5.00	0.80	9.35
10.	Kali Bojong Rangkong	2,900	2.00	7.00	5.00	-	-
11.	Kali Irigasi						
12.	Primer Kali Malang	8,900	2.50	24.00	14.00	16.00	19.00
13.	Saluran Rawa baru	4,500	1.60	12.00	10.00	3.50	11.00
14.	Saluran Bekasi Pangkal	2,700	1.70	12.00	10.00	4.50	10.20

15.	Saluran Bekasi Utara	5,900	1.50	10.0	7.00	2.50	8.50
16.	Saluran Pulo Timaha	1,400	1.20	6.00	4.00	0.50	4.00
17.	Saluran Tanah Tinggi	6,100	1.40	8.00	6.00	1.00	7.00
18.	Saluran Bekasi Tengah	3,100	1.60	14.00	11.00	1.50	11.00
19.	Saluran Pondok Ungu	4,900	1.60	11.00	8.00	1.00	9.50
20.	Bogor Penggarutan	3,200	1.30	7.00	5.00	1.00	3.00
21.	Kali Krupuk – Kali baru	24,00	2.00	10.00	9.00	2.00	19.00
22.	Kali Empet/Sal Rawa tembaga	-	-	-	-	-	-

Keterangan : lebar dan kedalaman dihitung rata-ratanya
Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2011

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada tahun 2011 yang dibandingkan dengan Baku Mutu Air PP No 82 tahun 2011 serta dengan menggunakan Metode Storet guna mengetahui Status Mutu Air berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 69 tahun 2005 dapat disimpulkan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Penentuan kelas berdasarkan PP No.82 Tahun 2001	Status Pergub Jabar No 69/2005 (Metode Storet)
1.	Kali Cikeas	II	Cemar Sedang
2.	Kali Cileungsi	II	Cemar Sedang
3.	Kali Bekasi	II	Cemar Berat
4.	Kali Baru	II	Cemar Berat
5.	Saluran Sekunder	II	Cemar Sedang

Sumber : BPLHD Kota Bekasi, 2011

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu:

- a. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung
- b. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi tahun 2011-2031, kawasan lindung Kota Bekasi adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Kawasan Lindung Kota Bekasi

Kawasan Lindung		Lokasi
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Kali Cikeas Kali Cileungsi Kali Bekasi Kali Sunter Kali Cakung Bantaran Sungai Cileungsi
	Daerah Sekitar Situ	Situ Rawalumbu Situ Rawagede Situ Rawapulo
	Tampungan Air dan Pengendali Banjir	Kawasan Karang Kitri Kawasan Harapan Baru Regensi Kawasan Taman Permata Cikunir Situ Uwong Kawasan Puri Gading

		Bendung Cikeas Kawasan Rawa Pulo Kelurahan Pengasinan Kawasan Rawa Pasung Kawasan Rawa Lele Jati Bening 2 Situ Jati Bening Kawasan Kompleks Kodam Jaya Kawasan Bumi bekasi 3 Situ Rawalumbu Saluran Rawalumbu Hulu PHP Narogong Rawa Gede Cipendawa Desa Jatimulya
Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Penyangga Hutan Kota Taman Kota Taman Lingkungan Taman Rekreasi Tempat Pemakaman Umum Lapangan Olah Raga/ lapangan Terbuka Hijau Sempadan Jalan Sempadan Sungai Pulau Jalan Sempadan Instalasi Bahaya Sempadan Kereta Api Taman Halaman Gedung Taman Persil Lahan Pekarangan	

Sumber : Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi

3.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dituntut pula

berupaya mewujudkan target dari indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait. Indikator-indikator tersebut antara lain :

- a. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- b. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- c. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
- d. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
- e. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
- f. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan tahun renstra sebelumnya, sasaran jangka menengah renstra K/L dan perangkat daerah, RTRW kewilayahan, serta amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs), maka isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, antara lain adalah :

1. Penegakan Hukum Lingkungan

Masih kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Peningkatan kualitas Udara

Hal ini menjadi isu strategis karena masih relatif tingginya tingkat pencemaran udara (pada tahun 2017 untuk parameter debu hasilnya adalah 333 Ug/m³);

3. Peningkatan kualitas Air

Masih tingginya tingkat pencemaran air (pada tahun 2017 indeks pencemaran 6.44 = cemar sedang);

4. Peningkatan perlindungan terhadap Konservasi dan Sumber Daya Alam

Belum optimalnya kegiatan penutupan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia (2.150 pohon) Hal ini menjadi isu strategis karena kecenderungan penggunaan lahan terbangun yang meningkat pesat di Kota Bekasi untuk dijadikan area perkantoran maupun pusat niaga telah menekan luasan area terbuka hijau.

5. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

Hal ini menjadi isu strategis karena belum maksimalnya penanganan sampah diwilayah permukiman dan pengelolaan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

6. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan, Hal ini menjadi isu strategis karena pemerintah tidak

akan dapat sepenuhnya menangani pengelolaan lingkungan dan sampah sehingga diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi lima tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan jangka menengah ditetapkan dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara sasaran jangka menengah dinas adalah langkah untuk mewujudkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD Kota Bekasi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan yang akan dijalankan.

Keterkaitan tujuan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan visi misi Kota Bekasi dapat dilihat dalam gambar berikut :

VISI TERWUJUDNYA KOTA BEKASI YANG CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN		
MISI 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	MISI 2 : Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana	MISI 5 : Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas

	kota yang maju dan memadai	serta lingkungan hidup yang nyaman
Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Meningkatkan ketersediaan prasarana. sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	Mewujudkan Kota Bekasi yang Nyaman
Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat	Indikator Kinerja Sasaran Kota Bekasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	

Namun berdasarkan hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Renstra tahun 2019-2020 terkait pelaksanaan pengelolaan sampah serta berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian target capaian pada indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
 Perubahan Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah
 Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan Dinas Lingkungan Hidup		Persentase Kinerja dan Layanan Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1 Meningkatkan Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup	64	65,8	67,6	69,4	72
			Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	77	77	77
2.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan persampahan dan limbah B3 dengan didukung peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup		Persentase Pengelolaan Timbunan Persampahan	80%	75%	74%	73%	72%
		1 Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Timbunan sampah yang ditangani	80%	75%	74%	73%	72%
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49	52	61,02	61,93	62,85
		1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH= IKA+IKU+IKTL IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49	52	61,02	61,93	62,85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS

5.1 Inovasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka merealisasikan Visi Kota Bekasi “Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ikhsan”. Pemerintah Kota Bekasi memiliki prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam 45 Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kota Bekasi sebagai cita-cita kepala daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah dan akan melakukan inovasi-inovasi yang di terhadap 7(tujuh) Program Prioritas Pembangunan daerah yang terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup pada matriks Tabel Inovasi Program dan Kegiatan.

Tabel. 5.1
Program dan Kegiatan Inovasi Dinas LH pada 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi

KETERANGAN			
NO.	45 PROGRAM PRIORITAS	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI)
1	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial (No.20)		
2	Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan (No.23) berbasis IT;		
3	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll. (No. 27)		
4	Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantar Gebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi (No.28)		

5.	Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy” (No. 30)		
6	Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage) (No. 35)		
7	Pengelolaan event “ <i>car free day</i> ” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan (No. 45)		

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
I	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)		
	Program Pengelolaan Sampah		
1	Persentase Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA	Penyediaan Fasilitas Pemusnahan Sampah (Berbasis Thermal) Skala RW untuk mendukung fasilitas Umum (Program Prioritas No. 20)	Penyediaan Incenerator
2	Persentase Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA	Penyediaan Aplikasi Monitoring Limbah B3 (Fasyankes) Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Program Prioritas No. 20)	Pembangunan Aplikasi Monev Limbah B3
3	Persentase Cakupan Area Pelayanan	Penyelenggaraan layanan URC unit reaksi cepat dalam merespon dan menangani pengaduan masyarakat terkait kasus permasalahan pencemaran lingkungan dan pembuangan sampah liar (Program Prioritas No.23)	Pengadaan Baktor Pengadaan kendaraan roda 4 (pick up)
4	Operasional TPA/TPS/SPA	Penataan titik zona pembuangan dan terkelolanya zona pembuangan yang telah ditutup sebagai (RTH)	1.Penutupan sementara dan akhir pada zona TPA menggunakan tanah/membran

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
I	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)		
		Ruang Terbuka Hijau (Program Prioritas No. 28)	<p>2.Rehabilitasi zona di TPA Sumur Batu</p> <p>3.Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase di area TPA Sumur Batu</p> <p>4.Pembangunan sumpit dan jaringan perpipaan pengumpul air lindi di zona TPA</p>
5	<i>Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R</i>	Penyediaan Pengolahan sampah melalui proses ramah lingkungan dengan teknologi pengolahan yang dapat dikonversikan menjadi energi dengan sistem <i>smart waste management</i> skala skala RW di (Program Prioritas No. 30)	<p>1. Kajian kelayakan pemusnahan sampah skala Kelurahan</p> <p>2.DED bangunan TPS untuk lokasi pemusnahan sampah skala kelurahan</p> <p>3.Pengadaan mesin pemusnah sampah dengan kapasitas skala RW di Setiap kelurahan</p> <p>4.Pembangunan TPS dan penyediaan sarana penunjang untuk pemusnahan</p>

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
I	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)		
			sampah skala kelurahan di lahan fasum

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
II	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan		
	Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan		
1	Indeks Kualitas Air	Penyediaan Fasilitas pembangunan sumur resapan yang memanfaatkan dan mengolah air banjir sebagai cadangan air tanah (Program Prioritas No. 35)	1.Pembangunan sumur resapan dan biopori
2	Indeks Kualitas Udara	Pemanfaatan RTH sebagai penghijauan guna mereduksi zat polutan dan meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang publik untuk edukasi, olahraga dan rekreasi (sebagai Kontribusi Terhadap Program Prioritas No. 27)	1.Rehabilitasi lahan Kritis menjadi lahan menjadi hutan/taman kota
3	Indeks Kualitas Air	Pembersihan sampah/gulma di daerah aliran sungai dengan	1 Penyediaan SDM (Pasukan Katak) dan sarana Pendukung Petugas Lapangan

		mengoptimalkan pasukan Katak Dinas LH. (Program Prioritas No. 35)	2. Pengadaan dan pemasangan screen/penyaring sampah di kali/saluran 3. Penyediaan perahu dan Ponton pengangkutan sampah
4	Indeks Kualitas Udara	Pemantauan Kualitas Udara secara kontinus dengan alat air quality monitoring system (AQMS) di area <i>car free day (CFD)</i> untuk mendukung peningkatan kualitas udara (Program Prioritas No. 45)	1. Pengujian kualitas udara ambien di area sekitar CFD dan diluar area CFD 2. Pengadaan dan pemasangan alat ukur kualitas udara (<i>air quality monitoring system/AQMS</i>) 3. Operasional dan pemeliharaan AQMS

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
III	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		
	Persentase Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan	Penyelenggaraan layanan Posko Pengaduan dan Penyediaan Aplikasi Pengaduan untuk mendukung unit reaksi cepat dalam merespon dan menangani pengaduan masyarakat terkait kasus permasalahan pencemaran lingkungan dan pembuangan sampah liar (sebagai Kontribusi Terhadap Program Prioritas No. 23)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan 2. Pengadaan Aplikasi pengaduan masyarakat 3. Operasionalisasi Sistem Jemput Bola Sampah
	Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	Kerja Sama dengan unsur Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam memilah sampah (Program Prioritas No.23)	Kerja Sama dengan Universitas Krisna Dwipayana dalam kegiatan Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT) selama 3(tiga) tahun melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM)

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
III	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
	Program Pengelolaan Sampah		
	Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	Pemusnahan sampah melalui pemanfaatan teknologi pemusnahan sampah untuk mereduksi sampah lama dan sampah baru yang ditimbulkan di Kota Bekasi untuk menjadi energi listrik atau lainnya (Skala Kota)(Program Prioritas No.23)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Sedekah Sampah Aparatur yang di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Instruksi Walikota Bekasi Nomor. 660.1/667/DinasLH 2. Pengadaan dan pemasangan Mesin Pemusnah Sampah Skala Perkantoran 3. Pembangunan sistem aplikasi database bank sampah yang terintegrasi dengan data pemusnahan sampah

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
IV	Bidang Tata Lingkungan		

	Program Konservasi dan Sumber Daya Alam		
	Pembangunan Taman KEHATI	Tersedianya Taman (Kehati) Keanekaragaman Hayati dengan memanfaatkan (RTH) Ruang Terbuka Hijau sebagai penghijauan guna mereduksi zat polutan dan meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang publik untuk edukasi, olahraga dan rekreasi (Program Prioritas No. 27)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota 2. Pengadaan pohon untuk penghijauan kota 3. Studi kelayakan Taman dan Hutan Kota di sekitar TPST Bantargebang dan Kecamatan Bantargebang 4. DED Taman dan Hutan Kota di sekitar TPST Bantargebang dan Kecamatan Bantargebang 5. Pengadaan lahan untuk pembangunan Taman dan Hutan Kota di sekitar TPST Bantargebang 6. Pengadaan pohon penghijauan

5.2 Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan Dinas untuk menghadapi isu-isu selama lima tahun ke depan, dilakukan analisis terhadap kondisi faktor internal yang dimiliki Dinas dan kondisi faktor eksternal yang dihadapi Dinas.

Kondisi Internal Dinas, terkait dengan	Kondisi Eksternal Dinas, terkait dengan
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan <ul style="list-style-type: none">a) Kualitas SDM Aparatur,b) Kuantitas SDM Aparatur	1. Dukungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">a) Ketaatan masyarakat terhadap peraturanb) Peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat dalam program/ kegiatanc) Kesadaran masyarakat/ kelompok masyarakat
2. Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan <ul style="list-style-type: none">a) Nilai/ besaran anggaran	2. Dukungan Perusahaan <ul style="list-style-type: none">a) Ketaatan perusahaan terhadap peraturanb) Peran serta perusahaan dalam program/ kegiatanc) Program/ kegiatan CSR perusahaan
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan <ul style="list-style-type: none">a) Kualitas peralatan dan perlengkapanb) Kuantitas peralatan dan perlengkapanc) Kualitas fasilitasd) Kuantitas fasilitas	3. Dukungan instansi pemerintah terkait <ul style="list-style-type: none">a) Peran OPD terkait<ul style="list-style-type: none">1) Dukungan Kebijakan OPD terkait2) Kerjasama/ koordinasi teknis dengan OPD terkaitb) Peran pemerintah provinsi<ul style="list-style-type: none">1) Dukungan Kebijakan Provinsi2) Dukungan Anggaran Provinsi3) Kerjasama/ koordinasi teknis dengan Provinsic) Peran pemerintah Pusat<ul style="list-style-type: none">1) Dukungan Kebijakan Pusat
4. Ketersediaan Kebijakan/ Kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan <ul style="list-style-type: none">a) Kualitas kebijakan/ kewenanganb) Kuantitas kebijakan/ kewenangan	
5. Ketersediaan metode (mekanisme/ prosedur) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan	

Kondisi Internal Dinas, terkait dengan	Kondisi Eksternal Dinas, terkait dengan
a) Kualitas metode (mekanisme/prosedur) b) Kuantitas metode (mekanisme/prosedur) 6. Ketersediaan data/informasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan c) Kualitas data/informasi d) Kuantitas data/informasi	2) Dukungan Anggaran Pusat 3) Kerjasama/koordinasi teknis dengan Pusat d) Peran pemerintah daerah sekitar 1) Dukungan Kebijakan pemerintah daerah sekitar 2) Dukungan Anggaran pemerintah daerah sekitar 3) Kerjasama/koordinasi teknis dengan pemerintah daerah sekitar

Dengan memperhatikan informasi-informasi yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka kondisi internal dan eksternal Dinas tersebut kemudian dapat dikelompokkan lebih lanjut dalam kelompok-kelompok faktor Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (tantangan/ancaman), sebagai berikut.

a. Faktor Strengths (kekuatan) Dinas, antara lain adalah

- 1. Kualitas peralatan dan perlengkapan yang tersedia cukup baik
- 2. Kualitas fasilitas yang tersedia cukup baik
- 3. Kualitas SDM Aparatur yang tersedia cukup baik
- 4. Kuantitas SDM Aparatur yang tersedia cukup memadai
- 5. Nilai/besaran anggaran yang tersedia cukup memadai
- 6. Kuantitas kebijakan/kewenangan yang tersedia cukup memadai

b. Weaknesses (kelemahan)

- 1. Data/informasi yang dimiliki belum valid
- 2. Data/informasi yang dimiliki masih terbatas
- 3. Kebijakan/kewenangan belum disusun secara optimal
- 4. Metode (mekanisme/prosedur/instrumen) pelaksanaan yang dimiliki belum memadai
- 5. Metode (mekanisme/prosedur/instrumen) pelaksanaan belum disusun secara optimal
- 6. Fasilitas pengolahan yang tersedia masih terbatas
- 7. Peralatan dan perlengkapan yang tersedia masih terbatas

c. Opportunities (peluang)

- 1. Program/kegiatan CSR perusahaan relatif berjalan dengan baik
- 2. Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam program/kegiatan mulai menguat meskipun masih terbatas
- 3. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat cukup memadai
- 4. Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi cukup memadai
- 5. Peran serta perusahaan dalam program/kegiatan cukup baik
- 6. Dukungan Kebijakan OPD terkait cukup memadai
- 7. Terdapat Dukungan Anggaran dari Provinsi
- 8. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Pusat sudah optimal
- 9. Dukungan Kebijakan pemerintah daerah sekitar cukup memadai
- 10. Terdapat Dukungan Anggaran dari pemerintah daerah
- 11. Kerjasama/koordinasi teknis dengan pemerintah daerah sekitar sudah optimal

d. Threats (tantangan/ancaman)

- 1. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan semakin menurun
- 2. Kesadaran masyarakat/kelompok masyarakat masih kurang
- 3. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan masih rendah
- 4. Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait belum optimal
- 5. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Provinsi belum optimal

Berdasarkan identifikasi atas faktor Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (tantangan/ancaman), maka dapat dirumuskan alternatif strategi umum (generik) yang dapat atau perlu dilakukan oleh Dinas sebagai berikut.

	Strengths (kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)
Internal	1.Kualitas peralatan dan perlengkapan 2.Kualitas fasilitas 3.Kualitas SDM Aparatur 4.Kuantitas SDM 5.Nilai Anggaran yang 6.Kuantitas kebijakan/kewenang an	1.Kualitas Data/informasi 2.Kuantitas Data/informasi 3.Kualitas Kebijakan/kewenangan 4.Kuantitas Metode (mekanisme/prosedur/ instrumen) 5.Kualitas Metode (mekanisme/prosedur/ instrumen) 6.Kuantitas Fasilitas 7.Kuantitas Peralatan dan perlengkapan
Eksternal		

Opportunities (peluang) 1. Program/kegiatan CSR perusahaan 2. Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam program/kegiatan 3. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat 4. Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi 5. Peran serta perusahaan dalam program/kegiatan 6. Dukungan Kebijakan OPD terkait 7. Dukungan Anggaran Provinsi 8. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Pusat 9. Dukungan Kebijakan pemerintah daerah sekitar 10. Dukungan Anggaran dari pemerintah daerah sekitar 11. Kerjasama/koordinasi teknis dengan pemerintah daerah sekitar	Strategi S - O Mengoptimalkan peralatan, perlengkapan, fasilitas, SDM aparatur, anggaran, dan kebijakan/kewenangan dalam a. Meningkatkan program/ kegiatan CSR dari perusahaan, b. Meningkatkan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dan perusahaan dalam program/kegiatan c. Mengoptimalkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan OPD terkait, serta pemerintah daerah sekitar d. Memanfaatkan dukungan anggaran dari Provinsi dan pemerintah daerah sekitar e. Mengoptimalkan kerjasama/ kordinasi teknis dengan pusat dan pemerintah daerah sekitar	Strategi W - O Mengatasi keterbatasan jumlah dan kuantitas data/informasi, kualitas kebijakan/kewenangan, jumlah dan kualitas metode (mekanisme/prosedur/instrumen), jumlah fasilitas, dan jumlah peralatan/perlengkapan dengan memanfaatkan a. Program/ kegiatan CSR dari perusahaan, b. Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dan perusahaan dalam program/kegiatan c. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan OPD terkait, serta pemerintah daerah sekitar d. Dukungan anggaran dari Provinsi dan pemerintah daerah sekitar e. Kerjasama/ kordinasi teknis dengan pusat dan pemerintah daerah sekitar
---	--	---

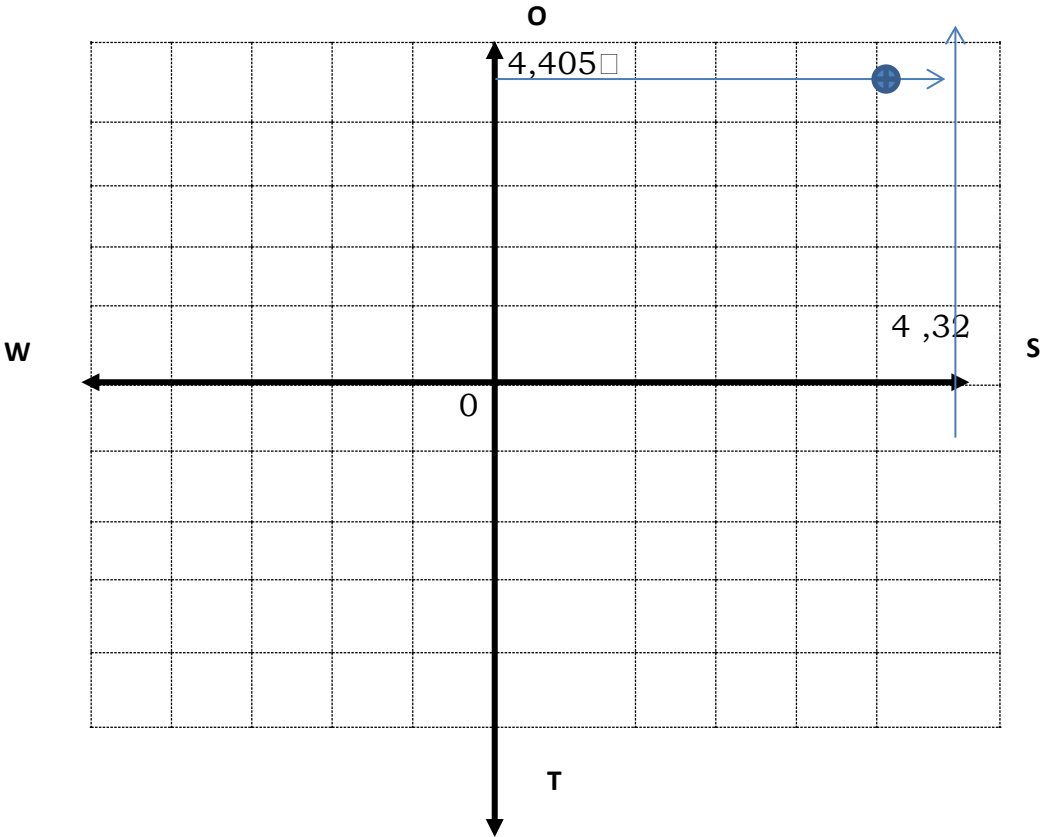
Threats (tantangan/ ancaman) 1. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan 2. Kesadaran masyarakat/kelompok masyarakat 3. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan	Strategi S - T Mengoptimalkan peralatan, perlengkapan, fasilitas, SDM aparatur, anggaran, dan kebijakan/kewenangan untuk mengatasi a. Ketidaktaatan perusahaan dan	Strategi W - T Mencari alternatif atas keterbatasan jumlah dan kuantitas data/informasi, kualitas kebijakan/kewenangan, jumlah dan kualitas metode (mekanisme/prosedur/instrumen), jumlah
--	---	---

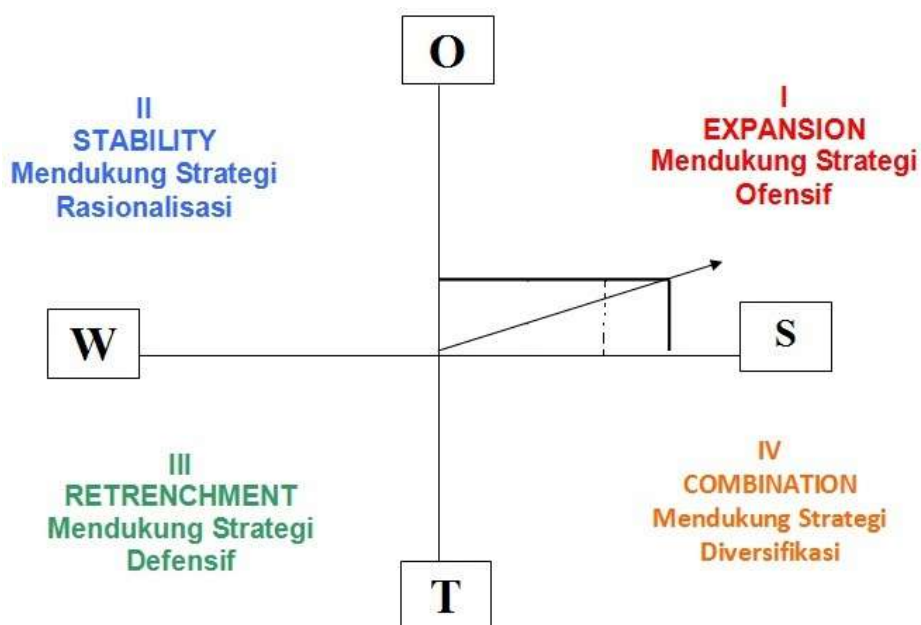
4. Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait	masyarakat terhadap peraturan	fasilitas, dan jumlah peralatan/perlengkapan dalam upaya mengatasi
5. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Provinsi	b. Rendahnya kesadaran masyarakat/ kelompok masyarakat	a. Ketidaktaatan perusahaan dan masyarakat terhadap peraturan
	c. Buruknya Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait dan Provinsi	b. Rendahnya kesadaran masyarakat/ kelompok masyarakat
		c. Buruknya Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait dan Provinsi

Untuk mengetahui strategi umum (generik) mana yang perlu dipilih, maka terlebih dahulu perlu diketahui posisi Dinas saat ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dan upaya penyelesaian isu-isu 5 tahun ke depan.

Dengan melakukan internal factors evaluation (IFE) dan external factors evaluation (EFE), maka dapat diketahui posisi Dinas sebagai berikut.

Gambar 5.1
Internal factors evaluation (IFE) dan
external factors evaluation (EFE) Dinas LH





Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Dengan memerhatikan Visi dan Misi Walikota Bekasi Tahun 2019-2023 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2019-2023, dirumuskan 6 (enam) strategi sebagai berikut:

1. Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
2. Strategi : Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan
3. Strategi : Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Strategi : Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
5. Strategi : Penegakan hukum lingkungan
6. Strategi : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat peduli lingkungan

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan			
Misi 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kinerja penyelenggaraan tata Kelola dan pelyanan pemerintahan daerah yang inovatif, melalui pengembangan sumberdaya aparatur dan pemanfaatam teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien melalui penyederhaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi
Misi 2 : Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas pengelolaan persampahan dan limbah B3 dengan didukung peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah	Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”* (Program Prioritas (45 Prioritas Kepala Daerah)
		2. Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan	Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap

			pembangunan berkelanjutan di Kota. (Program Prioritas (45 Prioritas Kepala Daerah
		3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat peduli lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup
Misi 5 : Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam	1.Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan	Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan
		2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan keseimbangan ekosistem dan Keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 2. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);* (Program Prioritas (45 Prioritas Kepala Daerah)
		3. Penegakan hukum lingkungan	Meningkatkan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya menjalankan visi-misi serta mencapai tujuan-sasaran rencana strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD yang saat ini masih dalam proses reviu, yang disusun dalam lampiran Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang terdiri dari Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (Rutin).

Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan Tahun 2021-2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pemangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tabel 6.1
Matrik sandingan program

No	Permendagri No 86/2017	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019/ Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3.	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
4.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No	Permendagri No 86/2017	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019/ Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
5.	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
6.	-	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
9.	Program Disiplin Aparatur	
10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

Rincian revisi tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2019-2023 diuraikan dalam lampiran tabel.

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode							NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
															Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
															TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
									Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Jumlah kebijakan pengurangan sampah	dokume n				500.000. 000	2 Kajian Akademik , 3 Penyusun an Kebijakan	500.000.0 00	2 Kajian Akademik , 3 Penyusun an Kebijakan	500.000. 000	2 Kajian Akademi k , 3 Penyusu nan Kebijaka n	500.000. 000	2 Kajian Akademi k , 3 Penyusu nan Kebijaka n	500.000.0 00	PSLB3				
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolah Sampah Mandiri	Jumlah sarana dan prasarana pengolah sampah mandiri	unit				1.000.00 0.000	25 Unit	1.000.000 .000	23 Unit	1.000.00 0.000	21 Unit	1.000.00 0.000	19 Unit	1.000.000. 000	PSLB3				
									Sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah	jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pengeurangan sampah	kecamat an				500.000. 000	5 Kecamata n Sosialisasi dan Edukasi	500.000.0 00	5 Kecamata n Sosialisasi dan Edukasi	500.000. 000	5 Kecamat an Sosialisas i dan Edukasi	500.000. 000	5 Kecamat an Sosialisasi dan Edukasi	500.000.0 00	PSLB3				
									Pengurangan sampah residu melalui TPS 3R	Jumlah pengurangan sampah residu melalui TPS 3R	%			20%		22%		24%		26%		27%		27%				
										Persentase jumlah sampah yang terangkut ke TPA	%	67,15	74	36.065.2 00.000	70	51.000.0 00.000	64	60.450.00 0.000	63	70.900.0 00.000	62	81.350.0 00.000	62	111.390.2 00.000	PSLB3			
			2	1	1	1	2.	0	Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota																			
									Penanganan Pengangkutan Sampah se- Kota Bekasi	Operasional Kendaraan Angkutan Sampah	Unit		328	13.000.0 00.000	377	15.000.0 00.000	392	17.000.00 0.000	412	19.000.0 00.000	412	21.000.0 00.000	412	21.000.00 0.000	PSLB3			
									Penanganan Sampah di TPA Sumur Batu dan Swapantau	Jumlah tonase sampah yang tertangani di TPA	tonase		1. 20 orang operator alat berat 2. 10 unit kendaraan alat berat	13.375.0 00.000	70% dari timbulan sampah	20.000.0 00.000	64% dari timbulan sampah	25.000.00 0.000	63% dari timbulan sampah	30.000.0 00.000	62% dari timbulan sampah	35.000.0 00.000	62% dari timbulan sampah		PSLB3			
									Penanganan sampah di SPA Medan Satria	Jumlah sampah yang tertangani di SPA Medan Satria	tonase		9.300 Liter, 30 Botol, 2 Jenis, 2 Jenis	100.000. 000	12000	150.000. 000	12000	200.000.0 00	12000	250.000. 000	12000	300.000. 000	12000		PSLB3			

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			2	1	1	2.	0	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
									Pengadaan Kendaraan Sarana Angkutan Sampah (baktor)	Jumlah baktor yang tersedia	Unit		28	1.350.000.000	100	5.000.000.000	106	5.300.000.000	112	5.600.000.000	118	5.900.000.000		23.150.000.000	PSLB3		
									Pengadaan Gerobak Sampah	Jumlah Gerobak Sampah			128 unit	515.200.000	130 unit	550.000.000	140 unit	600.000.000	150 unit	650.000.000	160 unit	700.000.000		3.015.200.000	PSLB3		
									Perawatan Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah Kendaraan operasional angkutan sampah yang terawat			69 Unit Armrol, 161 Unit Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	7.500.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	10.000.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	12.000.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	15.000.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	18.000.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	62.500.000.000	PSLB3		
									Perbaikan Bak kontainer	Jumlah Bak Kontainer SampahYang Diperbaiki	unit		10	225.000.000	12	300.000.000	10	350.000.000	15	400.000.000	17	450.000.000		1.725.000.000	PSLB3		
										Persentase cakupan area pelayanan	%	70	100	4.930.000.000	100	5.112.000.002	100	5.647.000.005	100	6.227.500.005	70	6.812.500.005	70	28.729.000.017	PSLB3	sesuai dengan penambahan lahan di TPA dan jumlah armada angkutan sampah	
									Penyelenggara an Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Bekasi Timur	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan Bekasi Timur	titik	-	18 Jenis, 3 Jenis, 7 Jenis, 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit	135.000.000	131	150.000.000	137	165.000.000	142	180.000.000	148	195.000.000		825.000.000			
									Pengendalian Sampah Liar	jumlah sampah liar yang tertangani	titik		50 titik	100.000.000	60	100.000.000	75	100.000.000	80	tabel 100.000.000	50	100.000.000		500.000.000	PSLB3		

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	titik		22 Jenis, 17 Jenis, 1 Unit, 1 Unit	135.000. 000	130	150.000. 000	130	165.000.0 00	130	180.000. 000	130	195.000. 000	825.000.0 00				
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Bekasi Utara	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	titik		16 Jenis, 14 Jenis, 1 Unit	135.000. 000	78	150.000. 000	83	165.000.0 00	88	180.000. 000	93	195.000. 000	93	825.000.0 00	PSLB3		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Bekasi Selatan	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	titik		14 Jenis, 13 Jenis, 1 Unit	135.000. 000	131	150.000. 000	137	165.000.0 00	142	180.000. 000	148	195.000. 000	148	825.000.0 00	PSLB3		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Rawalumbu	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	titik		25 Jenis, 18 Jenis, 1 Unit,1 Unit, 1 Unit	135.000. 000	74	150.000. 000	74	165.000.0 00	74	180.000. 000	74	195.000. 000	74	825.000.0 00	PSLB3		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Pondok Gede	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Pondok Gede	titik		21 Jenis, 11 Jenis, 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit	135.000. 000	96	150.000. 000	96	165.000.0 00	96	180.000. 000	96	195.000. 000	96	825.000.0 00	PSLB3		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Pondok Melati	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Pondok Melati	titik		28 Jenis, 10 Jenis, 1 Unit, 2 Unit	85.000.0 00	57	100.000. 000	57	115.000.0 00	57	130.000. 000	57	145.000. 000	57	575.000.0 00	PSLB3		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan medan satria	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Medan Satria	titik		17 Jenis, 14 Jenis	135.000. 000	70	150.000. 000	73	165.000.0 00	76	180.000. 000	76	195.000. 000	76	825.000.0 00	PSLB3		
									Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Bantargebang	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Bantargebang	titik		23 Jenis 11 Jenis, 1 Unit , 1 Unit	85.000.0 00	20	100.000. 000	20	115.000.0 02	20	130.000. 002	20	145.000. 002	20	575.000.0 06	PSLB3		

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode							NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
															Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
															TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
										Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Jatisampurna	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	titik		28 Jenis , 10 Jenis , 1 Unit , 1 Unit , 1 Unit	85.000.0 00	77	100.000. 000	82	115.000.0 01	87	130.000. 001	92	145.000. 001	92	575.000.0 03	PSLB3		
										Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Jatiasih	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Jatiasih	titik		17 Jenis, 11 Jenis, 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit	135.000. 000	53	150.000. 000	53	165.000.0 00	53	180.000. 000	53	195.000. 000	53	825.000.0 00	PSLB3		
										Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kontainer	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Jalur Kontainer	titik		27 Jenis, 11 Jenis, 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit	85.000.0 00	41	100.000. 002	41	115.000.0 02	41	130.000. 002	41	145.000. 002	41	575.000.0 08			
										Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Jalur Protokol	Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Jalur Protokol	titik		19 Jenis ATK, 11 Jenis Peralatan/Perl engkapan Kebersihan	135.000. 000	173	150.000. 000	173	165.000.0 00	173	180.000. 000	173	195.000. 000	173	825.000.0 00	PSLB3		
										Penyelenggar aan Aktifitas/Penu njang Operasional UPTD LH Kecamatan Mustikajaya	Tersedianya Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan Mustikajaya (ATK, Peralatan/Perl engkapan Kebersihan, Mesin Penghancur Kertas, Hardisk External)	titik		13 Jenis, 21 Jenis, 1 Unit, 1 Unit	135.000. 000	85	150.000. 000	85	165.000.0 00	85	180.000. 000	85	195.000. 000	85	825.000.0 00	PSLB3		
										Penyelenggar aan poll kendaraan Bojong Menteng	Terawatnya Sarana dan Prasarana Pool kendaraan Angkutan sampah di Bojong Menteng	titik		1. Rehabilitasi gudang sparepart 2. Pembuatan TPS/Gudang Limbah Oli Bekas/Spare part 3. Uang Piket 4. BBM 5. Rehab dan Pengecoran Selasar	1.000.00 0.000		1.500.00 0.000	Rehab dan Pengecor an 1 Unit Selasar , Tembok Pagar, Rehab Atap, Rehab Pintu Gerbang, BBM, Pembang unan Taman	1.750.000 .000	Pembang unan 1 Unit Gedung Mushola , Sarana Perbengkl elan, Pengecor an akses masuk poll, BBM	2.000.00 0.000	Pembang unan Pagar Keliling Area Pool, Pembang unan TPS, Rehab Gedung, BBM	2.250.00 0.000	8.500.000. 000	PSLB3			

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
													Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
													TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia			10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	2.200.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	4.400.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	4.840.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	5.324.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	5.377.000.000					
								Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah (Bantuan DKI)	Jumlah kendaraan operasional angkutan sampah			10 unit Arm Roll, 20 Unit Bak Kontainer	5.240.000.000											PSLB3		
								Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah		Unit				27 Unit Compacto r	30.000.000.000	15 Unit Compacto r	18.750.000.000	20 Unit Compacto r	26.000.000.000	20 Unit Compact or	26.000.000.000	Unit Compact or	26.000.000.000	PSLB3		
								Pembangunan Sistem Monitoring Pengangkutan Sampah	Jumlah Sistem Monitoring Pengangkutan Sampah Online					362 GPS , Perangkat control Room	5.000.000.000									PSLB3		
								Pembangunan SPA	Jumlah SPA yang terbangun					1 Lokasi	2.000.000.000	1 Lokasi	2.500.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.500.000.000		3.500.000.000	PSLB3		
								Penyelenggaran SPA	Jumlah operasional Pelayanan dan Pengelolaan Sampah di SPA					1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	250.000.000	1 Lokasi	300.000.000	1 Lokasi	350.000.000		350.000.000	PSLB3		
			2	11	11	2.02		Penerbitan izin pendaurulang sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta																		
			2	11	22	2.03	01	Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pembangunan Sistem Retribusi Sampah Online	Jumlah sistem retribusi online dan pen								1 sistem	500.000.000	1 sistem						
			2	11	11	2.03		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta																		
			2	11	22	2.03	03	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan	Pemeliharaan Sistem Monitoring Pengangkutan Sampah	Jumlah Sistem Monitoring Pengangkutan Sampah Online							500.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	PSLB3		

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET
								pengelolaan sampah																			
		2. MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH								PERSENTASE DAUR ULANG MELALUI AKTIFITAS 3R	%	24,94	20%		22%		24%		26%		27%		27%		PSLB3	perpres no. 97/2017	
			2	1 1	1 1	2. 01	0 4	Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R																	
									Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Jumlah Jakstrada Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga			1 Dokumen	200.000. 000										PSLB3			
									Operasional Bank Sampah Induk Patriot	Jumlah operasional BSIP			1 unit instalansi listrik; 1 unit instalasi air; 33 orang anggota,	300.000. 000	35 orang anggota, biaya langgana listrik 12 bulan	300.000. 000	35 orang anggota, biaya langgana listrik 12 bulan	300.000.0 00	35 orang anggota, biaya langgana listrik 12 bulan	300.000. 000	35 orang anggota, biaya langgana listrik 12 bulan	300.000. 000	35 orang anggota, biaya langgan a listrik 12 bulan	1.500.000. 000	TANING KLH	KEC.MUSTIKA JAYA	
									Pembangunan TPS Organik dan Anorganik	Jumlah TPS Organik dan Anorganik yang terbangun					7 Lokasi	3.500.00 0.000	2 Lokasi	1.000.000 .000	2 Lokasi	1.000.00 0.000	2 Lokasi	1.000.00 0.000		6.500.000. 000			
									Pembangunan Pengelolaan Daur Ulang	Jumlah Tempat Pengelolaan Daur Ulang yang terbangun					7 Lokasi	2.000.00 0.000	7 Lokasi	1.000.000 .000	7 Lokasi	1.000.00 0.000	7 Lokasi	1.000.00 0.000		5.000.000. 000	PSLB3		
									Pengadaan Bak Kontainer	Jumlah bak kontainer yang tersedia					43 Unit	1.300.00 0.000	49 Unit	1.500.000 .000	55 Unit	1.700.00 0.000	61 Unit	1.900.00 0.000		6.400.000. 000			
									Pengadaan Bin dan Bin Kontainer	Jumlah bin dan bin kontainer yang tersedia						300.000. 000		450.000.0 00		600.000. 000		850.000. 000		2.200.000. 000	PSLB3		
									Penyusunan Kajian Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Melalui	Jumlah dokumen kajian pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal					1 Kajian	500.000. 000							500.000.0 00	PSLB3			

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode							NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
															Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
															TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
										Teknologi Termal																		
										Revitalisasi Pemanfaatan Gas Metana Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA	Jumlah Revitalisasi Pemanfaatan Gas Metana Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA				1 Paket	1.000.000.000									1.000.000.000	PSLB3		
										Pemeliharaan Pemanfaatan Gas Metana Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA	Jumlah Pemeliharaan Pemanfaatan Gas Metana Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA						300.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	1.200.000.000					
										Perencanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Perencanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Dokumen	750.000.000								750.000.000	PSLB3			
										Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Berbasis Termal Skala RW	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Berbasis Termal Skala RW				1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000		4.000.000.000	PSLB3			
										Pembangunan Biodigister	Jumlah Pembangunan Biodigister					5.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	1Unit	2.000.000.000	1Unit	2.000.000.000	1Unit	11.000.000.000	PSLB3			
										Penyusunan Kajian Penggunaan Proses Termal	Jumlah Penyusunan Kajian Penggunaan Proses Termal					500.000.000								500.000.000				
										Pengadaan Bin LB3 Fasyankes	Jumlah Pengadaan Bin LB3 Fasyankes					150.000.000	135 Bin LB3	150.000.000	135 Bin LB3	150.000.000	135 Bin LB3	150.000.000	135 Bin LB3	600.000.000				
										Pembangunan Depo LB3 Posyankes	Jumlah Pembangunan Depo LB3 Posyankes					500.000.000	2 Depo LB3	500.000.000	2 Depo LB3	500.000.000	2 Depo LB3	500.000.000	2 Depo LB3	2.000.000.000	PSLB3			
										Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3					200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisasi	800.000.000	PSLB3			
										Sosialisasi Tanggap Darurat Limbah B3	Jumlah Sosialisasi Tanggap Darurat Limbah B3					200.000.001	4 Kali Sosialisasi	200.000.001	4 Kali Sosialisasi	200.000.001	4 Kali Sosialisasi	200.000.001	4 Kali Sosialisasi	800.000.004	PSLB3			
										Pembangunan TPS Limbah B3 Rumah Tangga	Jumlah Pembangunan TPS Limbah B3 Rumah Tangga					500.000.000	1 Unit TPS LB 3							500.000.000				

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode							NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
															Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
															TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
										Pengelolaan TPS Limbah B3 Rumah Tangga	Jumlah Pengelolaan TPS Limbah B3 Rumah Tangga					500.000. 000	12 Bulan	500.000.0 00	12 Bulan	500.000. 000	12 Bulan	500.000. 000	12 Bulan	2.000.000. 000	PSLB3			
										Penyediaan Lahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Penyediaan Lahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah					36.800.0 00.000	TPA (20.000m)	66.200.00 0.000	TPA (20.000m)	35.200.0 00.000	TPA (20.000m)	29.200.0 00.000	TPA (20.000 m)	167.400.0 00.000	PSLB3			
										Penyuluhan dan pembinaan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah	Jumlah sekolah yang akan dilakukan penyuluhan dan pembinaan pengelolaan sampah												-					
										Pembangunan sarana dan prasarana daur ulang sampah	Jumlah sarana dan prasarana daur ulang sampah													-				
										Pengadaan peralatan pengolah sampah di 12 Kecamatan (mesin peletisasi plastik dan gasifikasi)	Jumlah peralatan pengolah sampah (Mesin peletisasi plastik dan gasifikasi)								2 unit di 6 Kecamata n	1.200.00 0.000	2 unit di 6 Kecamat an	1.200.00 0.000		2.400.000. 000				
										Pemeliharaan peralatan pengolah sampah di 56 kelurahan (pembuat pelet plastik dan gasifikasi)	Jumlah peralatan pengolah sampah (Pembuat pelet plastik dan gasifikasi) yang dipelihara								2 unit di 6 Kecamata n	72.000.0 00	2 unit di 6 Kecamat an	72.000.0 00		144.000.0 00				
										Pembentukan daerah binaan dan peningkatan kader berseri (bersihkan sampah tiap hari) di setiap wilayah dan sekolah di 12 Kecamatan	Jumlah daerah binaan dan peningkatan kader berseri (bersihkan sampah tiap hari) di setiap wilayah dan sekolah di 12 Kecamatan yang terbentuk								6 kecamatan	300.000. 000	6 Kecamat an	300.000. 000		600.000.0 00				
											Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah		tidak ada		-		1		-		-		-	-	PSLB3	1 unit BUMD		
																	SPA 3 Lokasi		SPA 3 Lokasi		SPA 3 Lokasi		SPA 3 Lokasi	-				
																	Termal 30000		Termal 30000		Termal 30000		Termal 30000	-				
																	UPS 17 lokasi		UPS 17 lokasi		UPS 17 lokasi		UPS 17 lokasi	-				
																	Biodigiste r 5 Lokasi		Biodigiste r 5 Lokasi		Biodigiste r 5 Lokasi		Biodigist er 5 Lokasi	-				

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode							NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
															Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
															TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
																Pengelolaan Daur Ulang 5 Lokasi		Pengelolaan Daur Ulang 5 Lokasi		Pengelolaan Daur Ulang 5 Lokasi		Pengelolaan Daur Ulang 5 Lokasi	-					
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam									Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Satuan Nilai Indeks	47,15	49		52		54		56		59		59				
			2	11					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000		200.000.000		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!				
			2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																				
			2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang		Jumlah dokumen Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen			1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	#REF!			
			2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		1. Jumlah laporan evaluasi KLHS RPJMD 2. Jumlah titik pengujian Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PDRB Hijau) 3. Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi (DIKPLHD)	dokumen			1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	#REF!			
									Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (IKLH)	Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (IKLH)				2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	800.000.000	TALING	12 KECAMATAN			

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
									Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah laporan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK					1 Dokumen	400.000. 000	1 Dokumen	400.000.0 00	1 Dokumen	400.000. 000	1 Dokumen	500.000. 000	1 Dokume n	1.700.000. 000	TALING	12 KECAMATAN	
									Kajian Lingkungan Hidup akibat Proyek Strategis Nasional	Tersusunnya Inventarisasi Data Objek Proyek Strategis Nasional dan Dampak bagi Lingkungan Hidup					1 Laporan	500.000. 000							500.000.0 00				
			2	1 1	0 2	2. 02	0 3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Penilaian dan Pemantauan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang akan dinilai dan dipantau	usaha /kegiata n			200	200.000. 000	150	250.000. 000	100	250.000.0 00	100	250.000. 000	100	250.000. 000	100	1.200.000. 000	TALING	
			2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1. Jumlah pembinaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat	%	NA	30	950.000. 000	40	1.050.00 0.000	50	1.150.000 .000	60	1.200.00 0.000	70	850.000. 000	70	5.200.000. 000	TANING KLH	(GPL, Bank sampah,Sekolah Adiwiyata)	
			2	1 1	0 8	2. 01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			2	1 1	0 8	2. 01	0 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan pendidikan lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina		60	60 sekolah	250.000. 000	70	3000000 00	80	35000000 0	90	3500000 00	100		100	1.250.000. 000	TANING KLH	SE-KOTA BEKASI	
									Peringatan hari - hari lingkungan hidup	Jumlah peringatan hari- hari lingkungan hidup		2	3 Event	200.000. 000	3	250.000. 000	4	300.000.0 00	5	350.000. 000	5	350.000. 000	5	1.450.000. 000	TANING KLH	KOTA BEKASI (Bersama Bidang- Bidang)	
			2	1 1	0 8	2. 01	0 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	pemantauan dan evaluasi titik pantau adipura	Jumlah titik lokasi Pemantauan dan evaluasi adipura		12 kecamatan , 84 titik pantau adipura	12 kecamatan , 80 titik pantau adipura	500.000. 000	12 kecamata n , 84 titik pantau adipura	500.000. 000	12 kecamata n , 85 titik pantau adipura	500.000.0 00	12 kecamata n , 85 titik pantau adipura	500.000. 000	12 kecamata n , 85 titik pantau adipura	500.000. 000	12 kecamat an , 85 titik pantau adipura	2.500.000. 000	TANING KLH	12 KECAMATAN	

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
													Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
													TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			2	1 1	0 9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		2. Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima				300.000. 000		300.000. 000		300.000.0 00		300.000. 000		300.000. 000		1.500.000. 000		
			2	1 1	0 9	2. 01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			2	1 1	0 8	2. 01	0 1	Penilaian kinerja masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filandr opi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah penghargaan LH yang diterima			2	300.000. 000	2	300.000. 000	2	300.000.0 00	2	300.000. 000	2	300.000. 000	2	1.500.000. 000	TANING	Kota Bekasi
			2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		3. Persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan	%	100%	100	100.000. 000	100	250.000. 000	100	100.000.0 00	100	100.000. 000	100	100.000. 000	100	650.000.0 00	TANING	12 KECAMATAN
			2	1 1	1 0	2. 01		Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Kota																		
			2	1 1	1 0	2. 01	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengadaan aplikasi pengaduan masyarakat	Jumlah sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang terbangun dan tersedianya Operasional pemeliharaannya					1 System Aplikasi	150.000. 000							150.000.0 00	TANING	Kota Bekasi	
			2	1 1	1 0	2. 01	0 2	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan Hidup	Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan	usaha/ kegiatan	37	50	100.000. 000	50	100.000. 000	50	100.000.0 00	50	100.000. 000	50	100.000. 000	50	500.000.0 00	TANING	Kota Bekasi

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
													Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
													TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			2	1	0	2.	0	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penyelenggara an Aktifitas Laboratorium Lingkungan dan Sarana Pendukungnya		kegiatan							1	300.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000	UPTD LAB		
									Re-akreditasi Laboratorium Lingkungan	Jumlah sertifikat akreditasi UPTD Laboratorium oleh KAN dan KLHK, Inhouse Training, belanja barang peralatan/perengkapan lab,	Sertifikat Akreditasi dan registrasi lab dr KLHK		1 Sertifikat Akreditasi (Reakreditasi) dan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan dari KLHK) Inhouse Training, belanja barang peralatan/perengkapan lab	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Sertifikat Akreditasi (Reakreditasi) dan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan dari KLHK)	200.000.000	1 Sertifikat Akreditasi (Reakreditasi) dan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan dari KLHK)	300.000.000	1 Sertifikat Akreditasi (Reakreditasi) dan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan dari KLHK)	1.100.000.000	UPTD LAB	UTD LAB. LH
									Pemetaan Kerusakan Lingkungan di Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta kerawanan air bawah tanah					1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000		2.000.000.000	PPKLH	KOTA BEKASI
										5. Indeks Kualitas Udara		78,47	82,00 (Baik)	1.050.000.000	83,40(baik)	3.800.000.000	83,80 (baik)	3.500.000.000	84,20 (baik)	3.550.000.000	84,60 (baik)	3.750.000.000	84,60 (baik)	15.650.000.000	PPKLH	asumsi Kenaikan 0,5 %
			2	1	0	2.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase lokasi/wilayah yang dipantau kualitas udara ambien dan diinformasikan mutu kualitas udara ambien		84	84,42		84,8		85,2		85,6		86,02		86,02			asumsi Kenaikan 0,5 %
			2	1	0	2.	0	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
									Pengujian Sumber Emisi Tidak Bergerak	Jumlah usaha/kegiatan yang diuji sumber emisi tidak bergerak	usaha/kegiatan	30	30 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	250.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1Dokumen	300.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1Dokumen	350.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	400.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	450.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	1.750.000.000	PPKLH	30 TITIK /KOTA BEKASI

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			2	1	0	2.	0	2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Identifikasi dan Inventarisasi terhadap Usaha yang menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Medis	Jumlah titik identifikasi dan inventarisasi Usaha			50 pelaku Usaha	50.000.000	100 pelaku Usaha	100.000.000	100 pelaku Usaha	150.000.000	150 pelaku Usaha	200.000.000	250 pelaku Usaha	250.000.000		750.000.000	PSLB3	12KECAMATAN
			2	1	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																		
			2	1	0	2.			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															-			
			2	1	0	2.	0	3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penertiban terhadap penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan LH (SIPLC, TPS B3, SIPA) pada usaha dan atau kegiatan di Kota Bekasi	Jumlah usaha/kegiatan yang menerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan LH (SIPLC, TPS B3 dan SIPA) pada Usaha dan atau Kegiatan di Kota Bekasi.	Laporan		50 titik Usaha / Kegiatan	100.000.000	75 titik Usaha / Kegiatan	150.000.000	100 titik Usaha / Kegiatan	175.000.000	100 titik Usaha / Kegiatan	200.000.000	100 titik Usaha / Kegiatan	200.000.000	100 titik Usaha / Kegiatan	825.000.000	TANING KLH	12 KECAMATAN
									Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Berdasarkan Dokumen RKL-RPL(Bantuan DKI)	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Berdasarkan Dokumen RKL-RPL	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Berdasarkan Dokumen RKL-RPL			1 Laporan	4.500.000.000	1 Laporan	5.500.000.000	1 Laporan	6.500.000.000	1 Laporan	6.500.000.000	1 Laporan	6.500.000.000	1 Laporan	29.500.000.000	PSLB3	KEC.BANTAR GEBANG
									Lanjutan Pembangunan Tahap 2 Sumur Pantau (Bantuan DKI)	Jumlah Sumur Pantau yang terbangun			2 Unit Sumur pantau	1.500.000.000											1.500.000.000		KEC.BANTAR GEBANG

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)		7. Persentase Pemanfaatan, Pengelolaan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (5 Titik)	Lokasi	5	5	41.700.0 00.000	5	1.250.00 0.000	5	7.650.000 .000	5	5.200.00 0.000	5	4.800.00 0.000	5	78.850.00 0.000			
			2	1	0	2.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																			
			2	1	0	2.	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota	Jumlah Taman Hutan Kota yang tertata dan terkelola	lokasi		Pengelolaan 5 lokasi (danau duta harapan, hutan kota, kemang lfi, Alun-alun dan Taman Perwira)	1.000.00 0.000	Penataan Alun-alun dan Pengelolan an 5 lokasi (danau duta harapan, hutan kota, kemang lfi, Alun- alun dan Taman Perwira)	500.000. 000	Penataaan Danau Duta Harapan dan Pengelolan an 5 lokasi (danau duta harapan, hutan kota, kemang lfi, Alun- alun dan Taman Perwira)	6.000.000 .000	Penataaan Hutan Kota Patriot dan Pengelolan an 5 lokasi (danau duta harapan, hutan kota, kemang lfi, Alun- alun dan Taman Perwira)	3.000.00 0.000	5 lokasi (danau duta harapan, hutan kota, kemang lfi, Alun- alun dan Taman Perwira)	2.000.00 0.000	12.500.00 0.000	TALING/ UPTD HUTAN KOTA	HUTAN KOTA PATRIOT,HUTAN KOTA ALUN-ALUN, TAMAN KOTA JATIRASA, DANAU DUTA HARAPAN,TAMAN PERWIRA		
									Pengadaan Pohon Untuk Penghijauan Kota	Jumlah Pohon Endemik dan Pohon Pelindung Untuk Penghijauan Kota			900 Pohon endemik, 700 Pohon Pelindung	300.000. 000	-	-	900 Pohon endemik, 700 Pohon Pelindung	400.000.0 00	900 Pohon endemik, 700 Pohon Pelindung	450.000. 000	900 Pohon endemik, 700 Pohon Pelindun g	500.000. 000	900 Pohon endemik , 700 Pohon Pelindun g		TALING/ UPTD HUTAN KOTA	KOTA BEKASI	
									Pembangunan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbangun			200 org 1 dokumen 3 lokasi 1 dokumen	400.000. 000	-	-	1 dokumen 10 lokasi 1 dokumen	1.000.000 .000	1 dokumen 15 lokasi 1 dokumen	1.500.00 0.000	1 dokumen 20 lokasi 1 dokumen	2.000.00 0.000		4.900.000. 000	TALING	KOTA BEKASI	
									Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaraga man Hayati	Jumlah dokumen pengelolaan KEHATI dan Sistem Data Base			1 Paket	40.000.0 00.000	1 Dokumen (Profil Keanekar agaman Hayati Kota Bekasi)	250.000. 000	1 Dokumen (Rencana Induk Pengelolan an Keanekar agaman Hayati)	250.000.0 00	1 Dokumen (Identifika si Kawasan Bernilai Penting)	250.000. 000	1 Sistem Data Base (Sistem Informasi dan Pengelol aan Data Base Kehati)	300.000. 000		41.050.00 0.000	TALING	12 KECAMATAN	
									Kajian Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat Proyek Strategis Nasional	Jumlah laporan Inventarisasi Data Ruang terbuka Hijau yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional					1 Laporan	500.000. 000							500.000.0 00				

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI				
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW									
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.		
										3. Pembangunan Taman KEHATI (1 Lokasi)		belum ada	-	target dihapuskan karena tidak tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan Taman Kehati																	
									Pembangunan Taman KEHATI	Jumlah taman kehati yang terbangun																				TALING	
			X	X	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	89.728.7 00.000	100	98.576.5 70.000	100	108.432.2 27.000	100	14.849.3 52.177	100	14.829.2 90.394	100	326.416.1 39.571							
			x	x	0	1	2. 01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.0 00		100.000. 000		100.000.0 00		120.000. 000		150.000. 000		485.000.0 00							
			x	x	0	1	2. 01	0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunny a Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	15.000.0 00	6 Dokumen	100.000. 000	6 Dokumen	100.000.0 00	6 Dokumen	120.000. 000	6 Dokumen	150.000. 000	6 Dokume n	485.000.0 00							
			x	x	0	1	2. 02		Administrasi Keuangan Daerah					15.000.0 00		30.000.0 00		60.000.00 0		75.000.0 00		100.000. 000		280.000.0 00							
			x	x	0	1	2. 02	0	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN																					
			x	x	0	1	2. 02	0	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD																						
			x	x	0	1	2. 02	0	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunny a Laporan Keuangan	8 Laporan	15.000.0 00	8 Laporan	30.000.0 00	8 Laporan	60.000.00 0	8 Laporan	75.000.0 00	8 Laporan	100.000. 000	8 Laporan	280.000.0 00							
			x	x	0	1	2. 05		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20.000.0 00		22.000.0 00		24.200.00 0		100.000. 000		100.000. 000		266.200.0 00							
									Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	set	Jenis dan Jumlah Pakaian Khusus yang diadakan	-	-	-	-	520 stel	197.600. 000	520 stel	234.000. 000	520 stel	260.000. 000	1560 stel	691.500.0 00							

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
									Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Volume dan Jenis Pakaian Olah Raga Yang tersedia	set	Jenis dan Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan	-	-	-	-	520 stel	197.600.000	520 stel	234.000.000	520 stel	260.000.000	1560 stel	691.500.000			
									Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	kegiatan	Jenis dan Jumlah pendidikan dan Pelatihan Formal yang dibiayai	2	20.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	345.000.000			
			x	x	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.677.600.000		88.748.700.000		84.251.200.000		84.401.200.000		84.531.200.000		424.609.900.000			
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		Jenis dan Jumlah Rekening	11 UPTD	200.000.000	11 UPTD	150.000.000	11 UPTD	180.000.000	11 UPTD	200.000.000	11 UPTD	220.000.000	11 UPTD	950.000.000			
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia		jenis alat kebersihan dan jumlah	31 jenis bahan pembersih	50.000.000	31 jenis bahan pembersih	55.000.000	31 jenis bahan pembersih	65.000.000	31 jenis bahan pembersih	80.000.000	31 jenis bahan pembersih	85.000.000	31 jenis bahan pembersih	335.000.000			
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	jenis alat tulis kantor dan jumlah	50 jenis ATK	350.000.000	50 jenis ATK	350.000.000	50 jenis ATK	420.000.000	50 jenis ATK	450.000.000	50 jenis ATK	475.000.000	50 jenis ATK	2.045.000.000			
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	jenis barang cetakan penggandaan	26 jenis	200.000.000	26 jenis	200.000.000	26 jenis	240.000.000	26 jenis	260.000.000	26 jenis	280.000.000	26 jenis	1.180.000.000			
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	11 jenis	15.000.000	11 jenis	15.000.000	11 jenis	18.000.000	11 jenis	20.000.000	11 jenis	25.000.000	11 jenis	93.000.000			
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	example	jenis surat kabar dan majalah	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	42.000.000	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	207.000.000			
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kegiatan	Rapat,tamu, harian pegawai	1 Tahun	40.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		260.000.000			
									Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana	kegiatan	jumlah pelaksanaan koordinasi luar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	470.000.000	1 Tahun	2.040.000.000			
									Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi /teknis perkantoran	orang	1754 orang	1754 orang	81.367.600.000	1754 orang	87.503.700.000	1754 orang	82.726.200.000	1754 orang	82.726.200.000	1754 orang	82.726.200.000	1754 orang	417.049.900.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA AWAL	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
														Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
									Penyebarluas an Informasi Penyelenggar aan Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tersedia	exampla r	Media Cetak, Elektronik dan Website	1 Tahun	50.000.0 00	1 Tahun	50.000.0 00	1 Tahun	60.000.00 0	1 Tahun	70.000.0 00	1 Tahun	80.000.0 00	1 Tahun	310.000.0 00			
									Pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial	Jumlah verifikasi hibah dan bantuan sosial yang terlaksana		Terselengg araannya Verifikasi jumlah penerima hibah dan bansos	16 jilid laporan	20.000.0 00	-	-	16 jilid laporan	30.000.00 0	16 jilid laporan	40.000.0 00	16 jilid laporan	50.000.0 00	16 jilid laporan	140.000.0 00			
			x	x	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						780.000. 000		910.000. 000		1.040.000 .000		1.175.00 0.000		1.275.00 0.000		5.180.000. 000			
									Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang tersedia		Jenis dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	-	-	10 Printer, 5 Computer	65.000.00 0	10 Printer, 6 Computer	75.000.0 00	12 Printer, 6 Compute r	85.000.0 00	32 Printer, 17 Comput er	225.000.0 00			
									Penyediaan Ruang Kerja	Jumlah ruang kerja		Jumlah Ruang Kerja dalam tahun	3 unit	210.000. 000	3 unit	230.000. 000	3 unit	230.000.0 00	3 unit	250.000. 000	3 unit	270.000. 000	3 unit	1.190.000. 000			
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah Gedung yang terpelihara	18 UPTD	195.000. 000	18 UPTD	195.000. 000	18 UPTD	200.000.0 00	18 UPTD	250.000. 000	18 UPTD	270.000. 000	18 UPTD	1.110.000. 000			
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal	1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		unit kendaraan dinas/oprar asional yang terpelihara	19 unit mobi dan 21 unit motor	350.000. 000	19 unit mobi dan 21 unit motor	385.000. 000	19 unit mobi dan 21 unit motor	425.000.0 00	19 unit mobi dan 21 unit motor	450.000. 000	19 unit mobi dan 21 unit motor	475.000. 000	19 unit mobi dan 21 unit motor	2.085.000. 000			
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.Terlaksananya Pemeliharaa Rutin Berkala Gedung LAB dan UPTD		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	25.000.0 00	1 Paket	100.000. 000	1 Paket	120.000.0 00	1 Paket	150.000. 000	1 Paket	175.000. 000	1 Paket	570.000.0 00			

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2021-2023
(nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW						
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja								Nilai AKIP DLH				59.720.000.000		59.690.000.000		60.200.000.000		62.040.000.000		62.040.000.000		63.020.000.000			
									IKM																	
		2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	%	100	100	59.720.000.000	100	59.690.000.000	100	60.200.000.000	100	62.040.000.000	100	62.040.000.000	100	63.020.000.000				
		2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000				
		2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD, dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersusunnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	1.500.000.000				
		2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah				52.060.000.000		52.060.000.000		52.060.000.000		53.860.000.000		53.860.000.000		54.020.000.000				
		2	11	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan premi BPJS DLH				52.000.000.000		52.000.000.000		52.000.000.000		53.800.000.000		53.800.000.000		53.800.000.000				
		2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000				
		2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir keuangan bulanan/triwulanan /semesteran		Tersusunnya Laporan Keuangan	8 Laporan	40.000.000	8 Laporan	40.000.000	8 Laporan	40.000.000	8 Laporan	40.000.000	8 Laporan	40.000.000	8 Laporan	200.000.000				
		2	11	1	2.05		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPTIMALISASI DISIPLIN APARATUR				330.000.000		290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		420.000.000				
								Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	set	Jenis dan Jumlah Pakaian		300.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000						

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	kegiat an	Jenis dan Jumlah pendidikan dan Pelatihan Formal yang dibiayai	2	30.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	420.000.000			
		2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				470.000.000		480.000.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		480.000.000			
								Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan	11 jenis	40.000.000	11 jenis	40.000.000	11 jenis	40.000.000	11 jenis	40.000.000	11 jenis	40.000.000	11 jenis	40.000.000			
								Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	examp lar	jenis surat kabar dan majalah	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	-			
								Jumlah peralatan gedung yang tersedia		Jenis dan Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan		80.000.000		90.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		90.000.000			
								Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kegiat an	Rapat,tamu,ha rian pegawai	1 Tahun	50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		50.000.000			
								Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana	kegiat an	jumlah pelaksanaan koordinasi luar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000			
								Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tersedia	examp lar	Media Cetak, Elektronik dan Website	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-			
								Jumlah verifikasi hibah dan bantuan sosial yang terlaksana		Terselenggara annya Verifikasi jumlah penerima hibah dan bansos	16 jilid laporan	-	16 jilid laporan	-	16 jilid laporan	-	16 jilid laporan	-	16 jilid laporan	-	16 jilid laporan	-			
								Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	jenis barang cetakan penggandaan	26 jenis	50.000.000	26 jenis	50.000.000	26 jenis	200.000.000	26 jenis	200.000.000	26 jenis	200.000.000	26 jenis	50.000.000			
								Jumlah penyediaan bahan logistik	ATK		50 jenis ATK	50.000.000	50 jenis ATK	50.000.000	50 jenis ATK	200.000.000	50 jenis ATK	200.000.000	50 jenis ATK	200.000.000	50 jenis ATK	50.000.000			
		2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				5.060.000.000	100	5.060.000.000		5.060.000.000		5.100.000.000		5.100.000.000		5.100.000.000			

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		unit kendaraan dinas/oprarasi onal yang terpelihara	19 unit mobi dan 21 unit motor	-	19 unit mobi dan 21 unit motor	-	19 unit mobi dan 21 unit motor	-	19 unit mobi dan 21 unit motor	-	19 unit mobi dan 21 unit motor	-	19 unit mobi dan 21 unit motor	-			
								Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia		jenis alat kebersihan dan jumlah	31 jenis bahan pembersih	-	31 jenis bahan pembersih	-	31 jenis bahan pembersih	-	31 jenis bahan pembersih	-	31 jenis bahan pembersih	-	31 jenis bahan pembersih	-			
2. MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3 SERTA PERANSERTA MASYARAKAT DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP	2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan									%	63,79	80	159.790.000.000	75	260.370.000.000	74	231.080.000.000	73	175.756.000.000	72	805.580.000.000	72	609.668.000.000	PSLB3	2,7 jt (0,7 kg) 2100 Ton TPA SB 700-900 Ton /Hari perpres no.97/2017
							Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Luas Zona Buang Yang Terbangun	Ha					1		1		1		1		3			
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24,94	26%	159.790.000.000	27%	260.370.000.000	24%	231.080.000.000	26%	175.756.000.000	27%	805.580.000.000	27%	609.668.000.000	PSLB3	perpres no. 97/2017	
		2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah					159.790.000.000		260.370.000.000		231.080.000.000		175.756.000.000		805.580.000.000		609.668.000.000			
		2	11	11	2.01	2	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali																		
								Jumlah kebijakan pengurangan sampah	dokumen					2 Kajian Akademik , 3 Penyusunan Kebijakan	-	2 Kajian Akademik , 3 Penyusunan Kebijakan	-	2 Kajian Akademik , 3 Penyusunan Kebijakan	-	2 Kajian Akademik , 3 Penyusunan Kebijakan	-	2 Kajian Akademik , 3 Penyusunan Kebijakan	500.000.000	PSLB3	
								Jumlah sarana dan prasarana pengolah sampah mandiri	unit					25 Unit	-	23 Unit	-	21 Unit	-	19 Unit	1.000.000.000	PSLB3			
								jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pengeurangan sampah	kecamatan					5 Kecamatan Sosialisasi dan Edukasi	-	5 Kecamatan Sosialisasi dan Edukasi	-	5 Kecamatan Sosialisasi dan Edukasi	-	5 Kecamatan Sosialisasi dan Edukasi	-	5 Kecamatan Sosialisasi dan Edukasi	500.000.000	PSLB3	
								Jumlah pengurangan sampah residu melalui TPS 3R	%		26%		27%	24%		26%	1.950.000.000	27%	1.950.000.000						

TUJUAN	SASARAN	Kode					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
											Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								2. Persentase jumlah sampah yang terangkut ke TPA	%	67,15	26		27		24		26		27		27		PSLB3	
		2	11	11	2.01	3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota																	
								Jumlah Kendaraan Operasional Angkutan Sampah	Unit		328	10.000.000.000	377	10.000.000.000	392	10.000.000.000	412	15.000.000.000	412	10.000.000.000	412	21.000.000.000	PSLB3	
								Jumlah sampah yang tertangani di SPA Medan Satria	tonase		9.300 Liter, 30 Botol, 2 Jenis, 2	100.000.000	12000	100.000.000	12000	100.000.000	12000	100.000.000	12000	100.000.000	12000		PSLB3	
		2	11	11	2.01	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																	
								Jumlah baktor yang tersedia	Unit		28	200.000.000	100	200.000.000	106	200.000.000	112	200.000.000	118	200.000.000		1.000.000.000	PSLB3	
								Jumlah TPA/TPST/SPA yang terbangun	Ha		73.895.000.000		123.535.000.000		115.040.000.000		87.378.000.000		402.790.000.000					
								Jumlah Gerobak Sampah			128 unit	200.000.000	130 unit	200.000.000	140 unit	200.000.000	150 unit	200.000.000	160 unit	200.000.000		1.000.000.000	PSLB3	
								Jumlah Kendaraan operasional angkutan sampah yang terawat			69 Unit Armrol, 161 Unit, Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang	1.500.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit, Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther, 2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang,	1.500.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit, Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang,	1.500.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit, Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang,	1.500.000.000	79 Unit Armrol, 171 Unit, Dump Truck, 20 Unit Ranger, 15 Unit Hilux, 3 Unit Panther,2 Unit PU Grand Max, 1 Unit PU Kijang,	7.500.000.000	PSLB3			

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								3. Persentase cakupan area pelayanan	%	70	100		100		100		100		70			70		PSLB3	sesuai dengan penambahan lahan di TPA dan jumlah armada angkutan sampah
								Jumlah Bak Kontainer SampahYang Diperbaiki	unit		10	225.000.000	12	300.000.000	10	50.000.000	15	200.000.000	17	-		775.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan	titik	-	18 Jenis, 3 Jenis, 7 Jenis,	100.000.000	131	150.000.000	137	50.000.000	142	41.800.000.000	148	75.000.000.000		117.100.000.000			
								Jumlah dokumen Studi Kelayakan PLTSA Bersama disekitar TPST Bantargebang	Doku men					1	1.000.000.000										
								Jumlah dokumen AMDAL Pembangunan PLTSA di Sumur Batu	Doku men							1	1.000.000.000								
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan Bekasi Timur	titik	-	18 Jenis, 3 Jenis, 7 Jenis,	100.000.000	131	150.000.000	137	50.000.000	142	-	148	-		300.000.000			
								jumlah sampah liar yang tertangani	titik		50 titik	100.000.000	60	100.000.000	75	-	80	-	50	-		200.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	titik		22 Jenis, 17 Jenis, 1 Unit,	100.000.000	130	150.000.000	130	50.000.000	130	-	130	-		300.000.000			
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	titik		16 Jenis, 14 Jenis, 1 Unit	100.000.000	78	150.000.000	83	50.000.000	88	-	93	-	93	300.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	titik		14 Jenis, 13 Jenis, 1 Unit	100.000.000	131	150.000.000	137	50.000.000	142	-	148	-	148	300.000.000	PSLB3		

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	titik		25 Jenis, 18 Jenis, 1 Unit,	100.000.000	74	150.000.000	74	50.000.000	74	-	74	-	74	300.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Pondok Gede	titik		21 Jenis, 11 Jenis, 1 Unit,	100.000.000	96	150.000.000	96	50.000.000	96	-	96	-	96	300.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Pondok Melati	titik		28 Jenis, 10 Jenis, 1 Unit,	50.000.000	57	100.000.000	57	50.000.000	57	-	57	-	57	200.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Medan Satria	titik		17 Jenis, 14 Jenis	100.000.000	70	150.000.000	73	50.000.000	76	-	76	-	76	300.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Bantargebang	titik		23 Jenis 11 Jenis, 1 Unit ,	50.000.000	20	100.000.000	20	50.000.000	20	-	20	-	20	200.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	titik		28 Jenis , 10 Jenis , 1 Unit	50.000.000	77	100.000.000	82	50.000.000	87	-	92	-	92	200.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah Kecamatan Jatiasih	titik		17 Jenis, 11 Jenis, 1 Unit,	100.000.000	53	150.000.000	53	50.000.000	53	-	53	-	53	300.000.000	PSLB3		
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Jalur Kontainer	titik		27 Jenis, 11 Jenis, 1	50.000.000	41	100.000.000	41	50.000.000	41	-	41	-	41	200.000.000			
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Jalur Protokol	titik		19 Jenis ATK, 11 Jenis Peralatan/Perlengkan Kebersihan	100.000.000	173	150.000.000	173	50.000.000	173	-	173	-	173	300.000.000	PSLB3		
								Tersedianya Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan Mustikajaya (ATK, Peralatan/Perlengkan Kebersihan,	titik		13 Jenis, 21 Jenis, 1 Unit,	100.000.000	85	150.000.000	85	50.000.000	85	-	85	-	85	300.000.000	PSLB3		

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								Mesin Penghancur Kertas, Hardisk External)																	
								Terawatnya Sarana dan Prasarana Pool kendaraan Angkutan sampah di Bojong Menteng	titik			1. Rehabilitasi gudang sparepart 2. Pembuatan TPS/Gudang Limbah Oli Bekas/Spare part 3. Uang Piket 4. BBM 5 Rehab dan pengecoran selasar	465.000.000	Rehab 1 gudang Mes Karyawan dan Pos Jaga, pembangunan Tempat cuci kendaraan, pembangunan Tempat Ganti oli kendaraan, BBM, Rehab Pos Poll, Pemasangan 8 titik CCTV	2.000.000.000	Rehab dan Pengecoran 1 Unit Selasar , Tembok Pagar, Rehab Atap, Rehab Pintu Gerbang, BBM, Pembangunan Taman	500.000.000	Pembangunan 1 Unit Gedung Mushola , Sarana Perbengkelan, Pengecoran akses masuk poll, BBM	200.000.000	Pembangunan Pagar Keliling Area Pool, Pembangunan TPS, Rehab Gedung, BBM	590.000.000		3.755.000.000	PSLB3	
								Jumlah UPS yang dibangun dan perbaikan TPS serta sarana pendukungnya	unit			5	-	2	800.000.000	2	-	2	-	2	500.000.000	13	1.300.000.000		
								Operasional Tenaga KerjaKebersihan	unit			1870 Orang	-	1900	710.000.000		-		-		1.000.000.000		1.710.000.000	PSLB3	
								4. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	Poin	71,72	73			73		73		73		73		73		PSLB3	Permenlhk No. P.53/menlhk/Setjenkum.1/6/2016 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura
								Jumlah tonase sampah yang tertangani di TPA	tonase			1. 20 orang operator alat berat	13.375.000.000	70% dari timbulan sampah	20.000.000.000	64% dari timbulan sampah	25.000.000.000	63% dari timbulan sampah	4.000.000.000	62% dari timbulan sampah	1.300.000.000	62% dari timbulan sampah		PSLB3	
								Jumlah luasan Zona TPA Sumur BatuYang Direhabilitasi					15.000.000.000		20.000.000.000		25.000.000.000		-		-		35.000.000.000	PSLB3	
								Jumlah alat berat di TPA (excavator/buldozer/roadsweaper)				1 Unit Excavator & 1 Unit	6.000.000.000	3 Unit Excavator & 1 Buldozer	10.500.000.000			4 Unit Excavator & 1 Buldozer	-						

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW						
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
												Road Sweaper														
									Jumlah bak-bak kontainer pilah yang tersedia	Unit		30 unit bak dan 69%	750.000.000	30	775.000.000		900.000.000		-		-		1.200.000.000	PSLB3		
									Jumlah kendaraan operasional angkutan sampah tipe armroll	unit		10 Unit Arm Roll 20 Unit bak Container	5.240.000.000													
									Jumlah Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia			10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	2.200.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	4.400.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	4.840.000.000	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	-	10 Jenis Sarana Kerja /1817 Orang	-					
									Jumlah kendaraan operasional angkutan sampah			10 unit Arm Roll, 20 Unit Bak Kontainer	5.240.000.000											PSLB3		
									Jumlah kendaraan angkutan sampah (<i>compactator</i>)	Unit				27 Unit Compact or	30.000.000.000	15 Unit Compacto r	18.750.000.000	20 Unit Compact or	-	20 Unit Compactor	-	Unit Compacto r	26.000.000.000	PSLB3		
									Jumlah Sistem Monitoring Pengangkutan Sampah Online					362 GPS , Perangk at control Room	5.000.000.000									PSLB3		
									Jumlah SPA yang terbangun					1 Lokasi	2.000.000.000	1 Lokasi	2.500.000.000	1 Lokasi	-	1 Lokasi	-		3.500.000.000	PSLB3		
									Jumlah operasional Pelayanan dan Pengelolaan Sampah di SPA					1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	250.000.000	1 Lokasi	-	1 Lokasi	-		350.000.000	PSLB3		
		2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					12.000.000.000		13.000.000.000												
									Jumlah Jakstrada Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga			1 Dokumen	200.000.000		-		-		-		-			PSLB3		
									Jumlah operasional BSIP			1 unit instalansi listrik;	200.000.000	35 orang anggota, biaya langgana	400.000.000	35 orang anggota, biaya langgana	200.000.000	35 orang anggota, biaya langgana	200.000.000	35 orang anggota, biaya langgana	200.000.000	35 orang anggota, biaya langgana	1.200.000.000	TANING KLH	KEC.MUS TIKA JAYA	

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
													listrik 12 bulan		listrik 12 bulan		listrik 12 bulan		listrik 12 bulan						
									Jumlah TPS Organik dan Anorganik yang terbangun				1.000.000.000	7 Lokasi	2.000.000.000	2 Lokasi	3.000.000.000	2 Lokasi	3.000.000.000	2 Lokasi	1.000.000.000		10.000.000.000		
									Jumlah Tempat Pengelolaan Daur Ulang yang terbangun				-	7 Lokasi	-	7 Lokasi	-	7 Lokasi	-	7 Lokasi	-		-	PSLB3	
									Jumlah bak kontainer yang tersedia				500.000.000	43 Unit	500.000.000	49 Unit	500.000.000	55 Unit	500.000.000	61 Unit	500.000.000		2.500.000.000		
									Jumlah bin dan bin kontainer yang tersedia				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	PSLB3	
									Jumlah dokumen kajian pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal				500.000.000	1 Kajian	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	PSLB3	
									Jumlah Revitalisasi Pemanfaatan Gas Metana Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA				1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000		3.000.000.000		-		1.000.000.000		6.000.000.000	PSLB3	
									Jumlah Pemeliharaan Pemanfaatan Gas Metana Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	5.000.000.000		
									Jumlah Perencanaan Program Pengelolan Sampah Berbasis Masyarakat				300.000.000	1 Dokume n	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	PSLB3	
									Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Berbasis Termal Skala RW				-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		-	PSLB3	
									Jumlah Pembangunan Biodigister				1.000.000.000		1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	1Unit	1.000.000.000	1Unit	1.000.000.000	1Unit	5.000.000.000	PSLB3	
									Jumlah Penyusunan Kajian Penggunaan Proses Termal				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		-		1.200.000.000		
									Jumlah Pengadaan Bin LB3 Fasyankes				500.000.000		500.000.000	135 Bin LB3	500.000.000	135 Bin LB3	500.000.000	135 Bin LB3	500.000.000	135 Bin LB3	2.500.000.000		
									Jumlah Pembangunan Depo LB3 Posyankes				1.000.000.000		1.000.000.000	2 Depo LB3	1.000.000.000	2 Depo LB3	1.000.000.000	2 Depo LB3	1.000.000.000	2 Depo LB3	5.000.000.000	PSLB3	
									Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3				200.000.000		200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisas i	128.000.000	2 Kali Sosialisasi	200.000.000	2 Kali Sosialisasi	928.000.000	PSLB3	

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
								Jumlah Sosialisasi Tanggap Darurat Limbah B3					200.000.000		200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisasi	200.000.000	4 Kali Sosialisasi	1.000.000.000	PSLB3	
								Jumlah Pembangunan TPS Limbah B3 Rumah Tangga					1.500.000.000		1.500.000.000	1 Unit TPS LB 3	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.500.000.000		
								Jumlah Pengelolaan TPS Limbah B3 Rumah Tangga					500.000.000		500.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	PSLB3	
								Jumlah Penyediaan Lahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah					-		-	TPA (20.000m)	8.200.000.000	TPA (20.000m)	10.000.000.000	TPA (20.000m)	299.150.000.000	TPA (20.000m)	317.350.000.000	PSLB3	
								Jumlah sekolah yang akan dilakukan penyuluhan dan pembinaan pengelolaan sampah					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000		
								Jumlah sarana dan prasarana daur ulang sampah					500.000.000		500.000.000		500.000.000		-		500.000.000		2.000.000.000		
								Jumlah peralatan pengolah sampah (Mesin peletisasi plastik dan gasifikasi)					200.000.000		200.000.000		200.000.000	2 unit di 6 Kecamatan	200.000.000	2 unit di 6 Kecamatan	200.000.000		1.000.000.000		
								Jumlah peralatan pengolah sampah (Pembuat pelet plastik dan gasifikasi) yang dipelihara					500.000.000		500.000.000		500.000.000	2 unit di 6 Kecamatan	500.000.000	2 unit di 6 Kecamatan	500.000.000		2.500.000.000		
								Jumlah daerah binaan dan peningkatan kader berseri (bersihkan sampah tiap hari) di setiap wilayah dan sekolah di 12 Kecamatan yang terbentuk					200.000.000		200.000.000		200.000.000	6 kecamatan	200.000.000	6 Kecamatan	-		800.000.000		
								Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah		tidak ada			-		1		-		-		-		-	PSLB3	1 unit BUMD
																SPA 3 Lokasi		SPA 3 Lokasi		SPA 3 Lokasi		SPA 3 Lokasi	-		
																Termal 30000		Termal 30000		Termal 30000		Termal 30000	-		
																UPS 17 lokasi		UPS 17 lokasi		UPS 17 lokasi		UPS 17 lokasi	-		
																Biodigister 5 Lokasi		Biodigister 5 Lokasi		Biodigister 5 Lokasi		Biodigister 5 Lokasi	-		
																Pengelola an Daur Ulang 5 Lokasi		Pengelola an Daur Ulang 5 Lokasi		Pengelolaan Daur Ulang 5 Lokasi		Pengelola an Daur Ulang 5 Lokasi	-		

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	Kode					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
											Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW						
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar																		
								Jumlah sampah/gulma yang terangkut di Kali Bekasi	m3			1 kali bekas, 400 Orang (4 Gerakan Masyarakat Peduli Kali)	3.300.000.000	10.000 m3	3.300.000.000	10.000 m3	3.300.000.000	10.000 m3	3.300.000.000	10.000 m3	3.300.000.000	Kali-Kali di Kota bekas, 400 Orang (4 Gerakan Masyarakat Peduli Kali)	3.300.000.000		PPKLH
								Jumlah Alat Berat sebagai sarana pendukung pembersihan sampah di sungai	unit			1 Unit IPAL	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	PPKLH	KEC.BAN TAR GEBANG
								Jumlah penambahan Alat Berat sebagai sarana pendukung pembersihan sampah di sungai	unit			1 paket (lahan 2,5 Ha dan Konstruksi 3.767 M3/hr	1.750.000.000		2.000.000.000	1 Eco Amphibi	1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	PPKLH	KEC.BAN TAR GEBANG
								jumlah sumur resapan yang terbangun	titik			7	-		-		-		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	PPKLH	7 SEKOLAH/KOTA BEKASI
								Jumlah pohon yang tertanam di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu (Bantuan DKI)	pohon			6000 pohon	1.000.000.000		1.500.000.000		-		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	PPKLH	KEC.BAN TAR GEBANG
		2	11	3	2.02		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	
		2	11	3	2.02	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Aktifitas Laboratorium Lingkungan, Sampling, dan Pengujian Air Bersih, dan Udara Ambient, Honorarium Tenaga PHL Analis Kimia, Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer), Pengadaan Mebeulier, Pembuatan Ruang Microbiologi	Petugas sampling, analisis, pegawai administrasi, pns	6, 7, 5	48 Titik Sampel (pengujian Air Bersih 36 titik, pengujian kualitas udara 12 titik) untuk Melayani Pengaduan; 7 Orang Analis Kimia; Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer); Pengadaan Mebeulier;	750.000.000	48 Titik Sampel (pengujian Air Bersih 36 titik, pengujian kualitas udara 12 titik) untuk Melayani Pengaduan; 7 Orang Analis Kimia; Pembuatan IPAL LAB, Pengadaan alat	750.000.000	70 Titik Sampel (pengujian Kualitas Air Bersih 48 titik, kualitas udara 24 titik) untuk Melayani Pengaduan; 8 Orang Analis Kimia;	780.000.000	70 Titik Sampel (pengujian Kualitas Air Bersih 48 titik, kualitas udara 24 titik) untuk Melayani Pengaduan; 8 Orang Analis Kimia;	700.000.000	70 Titik Sampel (pengujian Kualitas Air Bersih 48 titik, kualitas udara 24 titik) untuk Melayani Pengaduan; 8 Orang Analis Kimia;	700.000.000	70 Titik Sampel (pengujian Kualitas Air Bersih 48 titik, kualitas udara 24 titik) untuk Melayani Pengaduan; 8 Orang Analis Kimia;	700.000.000	70 Titik Sampel (pengujian Kualitas Air Bersih 48 titik, kualitas udara 24 titik) untuk Melayani Pengaduan; 8 Orang Analis Kimia;	SEK/LAB LH	UPTD LAB. LH

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW							
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
												Pembuata n Ruang		pengujia n udara.													
								Jumlah sertifikat akreditasi UPTD Laboratorium oleh KAN dan KLHK, Inhouse Training, belanja barang peralatan/perlengka pan lab,	Sertifik at Akredi tasi dan registr asi lab dr KLHK			1 Sertifikat Akreditasi (Reakredit asi) dan registrasi sebagai Laboratori um Lingkunga n dari KLHK) Inhouse Training, belanja barang peralatan/ perlengka pan lab	1.200.000.000	1 Laporan	2.450.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Sertifikat Akreditasi (Reakredi tasi) dan registrasi sebagai Laboratori um Lingkung an dari KLHK)	500.000.000	1 Sertifikat Akreditasi (Reakredita si) dan registrasi sebagai Laboratori um Lingkungan dari KLHK)	500.000.000	1 Sertifikat Akreditasi (Reakredit asi) dan registrasi sebagai Laboratori um Lingkunga n dari KLHK)	500.000.000	500.000.000	UPTD LAB	UTD LAB. LH	
								Jumlah dokumen peta kerawanan air bawah tanah	dokum en				-	1 Dokume n	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	PPKLH	KOTA BEKASI			
								2. Indeks Kualitas Udara		78,47	83 (Baik)	31.040.000.000	83,4 (baik)	36.800.000.000	83,8 (baik)	17.000.000.000	84,2 (baik)	18.400.000.000	84,6 (baik)	19.370.000.000	84,6 (baik)	19.370.000.000	PPKLH	asumsi Kenaikan 0,5 %			
		2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lokasi/wilayah yang dipantau kualitas udara ambien dan diinformasikan mutu kualitas udara ambien																			
		2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																				
								Jumlah usaha/kegiatan yang diuji sumber emisi tidak bergerak	usaha/ kegiat an	30	30 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	500.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1Dokumen	1.000.000.000	30 Usaha/Kegiatan 1Dokumen	500.000.000	30 Usaha/ Kegiatan 1	1.000.000.000	30 Usaha/ Kegiatan 1	1.620.000.000	30 Usaha/ Kegiatan 1	1.620.000.000	PPKLH	30 TITIK /KOTA BEKASI			

TUJUAN	SASARAN	Kode						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
												Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW						
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
								Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (IKLH)	dokum en				2.000.000.000	2 Dokume n	2.000.000.000	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen	1.250.000.000	TALING	12 KECAMA TAN	
								Jumlah laporan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Lapora n				3.000.000.000	1 Dokume n	3.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	TALING	12 KECAMA TAN	
								Jumlah laporan Inventarisasi Data Objek Proyek Strategis Nasional dan Dampak bagi Lingkungan Hidup	Lapora n				2.540.000.000	1 Laporan	2.800.000.000		250.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000					
		2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS limbah B3		40,35	45	1.500.000.000	50%	1.720.000.000	55%	1.800.000.000	60%	1.920.000.000	65%	1.970.000.000	65%	1.970.000.000				
		2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara limbah B3																			
		2	11	5	2.01	2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah titik identifikasi dan inventarisasi Usaha	titik		50 pelaku Usaha	1.500.000.000	100 pelaku Usaha	1.720.000.000	100 pelaku Usaha	1.800.000.000	150 pelaku Usaha	1.920.000.000	250 pelaku Usaha	1.970.000.000		1.970.000.000	PSLB3	12KECA MATAN		
		1	22	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		40,35	50	800.000.000	52%	850.000.000	55%	1.800.000.000	60%	1.900.000.000	65%	2.000.000.000	65%	2.000.000.000				
		2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				800.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	Kode					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KO TA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCAME) /KEGIATAN (OUTPUT)	Satua n	Data Eksisting 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AHIR TAHUN RPJMD		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
											Tahun 2019		Tahun 2020 REVIEW		Tahun 2021 REVIEW		Tahun 2022 REVIEW		Tahun 2023 REVIEW					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	kelom pok	60	60 sekolah	220.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	90	350.000.000	100	-	100	1.220.000.000	TANING KLH	SE-KOTA BEKASI
								Jumlah peringatan hari-hari lingkungan hidup		2	3 Event	200.000.000	3	250.000.000	4	300.000.000	5	350.000.000	5	7	5	1.100.000.007	TANING KLH	KOTA BEKASI (Bersama Bidang-Bidang)
		2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah titik lokasi Pemantauan dan evaluasi adipura		12 kecamatan , 84 titik pantau adipura	12 kecamatan , 80 titik pantau adipura	500.000.000	12 kecamatan , 84 titik pantau adipura	500.000.000	12 kecamatan , 85 titik pantau adipura	500.000.000	12 kecamatan , 85 titik pantau adipura	500.000.000	12 kecamatan , 85 titik pantau adipura	500.000.000	12 kecamatan , 85 titik pantau adipura	2.500.000.000	TANING KLH	12 KECAMATAN
								Jumlah penghargaan LH yang diterima			2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	1.500.000.000	TANING	Kota Bekasi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang ditampilkan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Hasil Reviu terhadap Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Penilaian Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	71,72	Poin	73	73	73	73	73	73
2	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	67,15	%	74	70	64	63	62	62
3	Persentase cakupan area pelayanan	70	%	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	24,94	%	20%	22%	24%	26%	27%	27%
5	Persentase Institusi /Kelompok Masyarakat /Lingkungan yang Peduli Lingkungan	NA	%	30	40	50	60	70	70

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
6	Persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan	100	%	100	100	100	100	100	100
7	Hasil pengukuran indeks kualitas air	4 (6,44)	kelas & IP (Indeks Pencem ar)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)
8	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	82	IKU	82	83,4	83,8	84,2	84,6	84,6
9	Persentase Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah	40,35	%	50	52	55	60	65	65
10	Persentase Usaha dan atau kegiatan yang memiliki TPS Limbah B3	40	%	45 .	50	55	60	65	65
11	Jumlah Pembangunan Taman KEHATI	belum ada	lokasi	-	Indikator dihapuskan karena tidak adanya ketersediaan lahan seluas 3Ha untuk pembangunan Taman Kehati				
12	Jumlah Laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca	belum ada	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	5 Laporan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi seperti yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2019–2023.

RENSTRA Revisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang merupakan rencana tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama lima tahun dan menjadi acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemantauan dan pengawasan serta pengambilan kebijakan.

RENSTRA Revisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bekasi**



YAYAN YULIANA